

Panel Penasihat Independen Tangguh
(*Tangguh Independent Advisory Panel- TIAP*)

Laporan
tentang
Operasional
dan
Proyek Pengembangan Tangguh

Mei 2020

Daftar Isi

I. Kata Pengantar	4
II. Isu-isu yang menjadi perhatian	6
III. Rekomendasi	12
IV. Politik Terkini	17
V. Keamanan dan HAM	26
VI. Dana Bagi Hasil	34
VII. Pengembangan Tenaga Kerja Papua	35
VIII. Program Sosial dan Pengembangan Masyarakat	42

Singkatan dan Istilah

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BAPPENAS	Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BPK	Badan Pemeriksaan Keuangan
BOF	<i>Bulk Offloading Facility</i>
CAP	<i>Community Action Plan</i> (Rencana Aksi Masyarakat – program dukungan untuk memfasilitasi proyek pembangunan berbasis masyarakat di kampung-kampung yang terkena dampak langsung)
C&EA	<i>Communication and External Affairs</i> (Tim yang mengurus komunikasi dan hubungan dengan eksternal)
CSTS	Chiyoda-Saipem-Tripatra-Suluhardi (Kontraktor EPC yang mengerjakan Proyek Pengembangan Tangguh)
DBH	Dana Bagi Hasil
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FKPM	Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat
Gol	<i>Government of Indonesia</i> (Pemerintah Indonesia)
ICBS	<i>Integrated Community Based Security</i> – Program Pengamanan Terpadu Berbasis Masyarakat
ICRS	<i>International Committee of the Red Cross</i> – Komite Palang Merah Internasional
IDR	<i>Indonesian Rupiah</i> – Rupiah Indonesia
IP	<i>Indigenous People</i> – Masyarakat Asli
KADIN	Kamar Dagang Indonesia
KNPB	Komite Nasional Papua Barat
LNG	<i>Liquid Natural Gas</i> – Gas alam cair
LP3BH	Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum
MRP	Majelis Rakyat Papua
MUI	Majelis Ulama Indonesia
PLN	Perusahaan Listrik Negara
SKKMigas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
TEP	<i>Tangguh Expansion Project</i> – Proyek Pengembangan Tangguh
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TSDP	<i>Tangguh Sustainable Development Program</i> – Program Pembangunan Keberlanjutan Tangguh
VPHR	<i>Voluntary Principal of Human Rights</i> - Prinsip Sukarela mengenai Hak Asasi Manusia

I. Kata Pengantar

Panel Penasihat Independen Tangguh ("*Tangguh Independent Advisory Panel* - TIAP" atau "Panel") dibentuk untuk memberikan saran eksternal bagi para pengambil keputusan papan atas BP berkenaan dengan aspek non-komersial Proyek LNG Tangguh ("Proyek"), serta bertujuan khusus untuk memberi saran kepada BP agar Tangguh dapat mewujudkan potensinya sebagai model pembangunan kelas dunia. Panel saat ini diketuai mantan Senator Amerika Serikat Tom Daschle yang pernah menjabat sebagai Pemimpin Mayoritas Senat AS, serta termasuk diantaranya Augustinus Rumansara, orang Papua yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Panel Penilaian Kepatuhan Bank Pembangunan Asia ("ADB") dari tahun 2003 hingga 2008, Penasihat Gubernur Papua dari tahun 2008 sampai 2010, serta saat ini menjabat sebagai Ketua Satgas Pembangunan Rendah Karbon Papua¹. Panel menggunakan jasa konsultasi dan sekretariat independen yang dikepalai oleh partner senior, Gary Klein dan dibantu oleh Spencer Wolf yang merupakan konsultan dari Daschle Group. Panel yang saat ini bertugas dibentuk pada tahun 2011 dan masa tugasnya telah diperpanjang oleh BP hingga Juni 2020².

Laporan ini adalah laporan lengkap kelima yang dihasilkan oleh Panel dan dibuat pada waktu yang unik. BP terlibat dalam ekspansi besar Tangguh yang akan menambah 50% kapasitasnya. Ekspansi tersebut, dikenal sebagai Proyek Pengembangan Tangguh ("TEP"), akan terdiri dari pembangunan kilang ketiga di dalam site, satu dermaga, dua buah anjungan lepas pantai, dan 16 sumur baru. Pada saat kunjungan kami, lebih dari 14.000 pekerja proyek pembangunan bekerja dan tinggal di dalam site. Pada tahun 2014, BP telah menyelesaikan analisis mengenai dampak sosial dan lingkungan ("AMDAL-TEP") yang mengatur komitmen Tangguh selama masa konstruksi (yang dijadwalkan akan selesai pada

¹ Untuk keperluan laporan ini, istilah "Papua" mengacu kepada wilayah yang mencakup baik provinsi Papua dan Papua Barat. Istilah provinsi Papua mengacu kepada provinsi Papua setelah pemisahannya dengan provinsi Papua Barat. Istilah Papua Barat mengacu kepada provinsi Papua Barat (yang sebelumnya diketahui sebagai Irian Jaya Barat) setelah didirikan pada tahun 2004. Peta Papua dan Papua Barat yang menunjukkan lokasi-lokasi terkait dengan Tangguh dapat dilihat di Lampiran A.

² TIAP didirikan oleh bp pada tahun 2002. Mantan pimpinan mayoritas senat George Mitchell memimpin panel pertama yang memantau konstruksi tahap pertama proyek. Panel ini juga termasuk Lord Hannay of Chiswick, Duta Besar Sabam Siagian, dan Pendeta Herman Saud.

2021) dan, bersamaan dengan AMDAL pertama di tahun 2004, akan beroperasi setelahnya³.

Laporan ini akan berusaha menghadirkan pengalaman TIAP sebelumnya dan konsultasi pada saat ini terhadap hal-hal tertentu dan akan membantu mengarahkan BP dalam melakukan evaluasi and implementasi komitmen yang ada dan baru, khususnya yang berkaitan dengan dampaknya terhadap masyarakat di Teluk Bintuni dan Papua, dan Indonesia secara umum. Panel juga mengamati beberapa tantangan khusus terkait dengan operasi simultan dan konstruksi besar. Sebagaimana laporan TIAP sebelumnya, laporan ini akan dipublikasikan, bersama dengan tanggapan BP, dan akan disajikan kepada dan dibahas dengan pihak-pihak yang berkepentingan di Jakarta dan London.⁴

Sebagai tambahan dari kegiatan TIAP, Tangguh juga diawasi oleh Grup Pemberi Pinjaman Tangguh, diwakili oleh ADB, Japan Bank for International Cooperation dan Mizuho Corporate Bank, yang telah membentuk panel eksternal dengan beranggotakan pakar independen yang rutin mengunjungi Tangguh. Tinjauan mereka terbatas pada isu keselamatan, lingkungan, pemukiman kembali, dan program-program sosial. Sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja Grup Pemberi Pinjaman Tangguh, TIAP fokus pada hal-hal terkait keamanan, hak asasi manusia, tata kelola, pengelolaan pendapatan, iklim politik dan isu-isu lebih luas mengenai bagaimana Tangguh mempengaruhi masyarakat Teluk Bintuni dan Papua, serta persepsi mereka terhadap Proyek. Faktor-faktor ini berkaitan langsung dengan kemampuan BP untuk menjadikan Tangguh sebagai model pembangunan kelas dunia.

Di bulan Januari 2020, TIAP mengunjungi Papua Barat (Manokwari dan Teluk Bintuni), serta Jakarta. Panel bertemu dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat, pejabat senior Pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, kepala SKK Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Panel juga berdiskusi dengan Duta Besar Inggris dan Kedutaan Amerika⁵ mengenai Tangguh. Panel juga bertemu dengan beberapa mitra pelaksana BP yang bekerja mendukung program BP dalam pengembangan masyarakat Papua.

³ Lihat laporan TIAP Mai 2014 pada bagian 10 untuk melihat lebih rinci mengenai pengembangan yang diajukan.

⁴ Akan ada presentasi terpisah di Washington, D.C, London yang akan dipublikasikan kepada semua pemangku kepentingan dan *webcast*. Laporan ini juga akan tersedia, bersamaan dengan tanggapan bpm di situs resmi bp. Lihat https://www.bp.com/en_id/indonesia/home/news/reports.html.

⁵ Duta Besar Amerika Serikat bersiap untuk kembali ke negaranya dan penggantinya masih belum diketahui.

TIAP bertemu dengan Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni, dan Kapolda Provinsi Papua Barat⁶. Di Teluk Bintuni, TIAP juga bertemu dengan beberapa pimpinan masyarakat Papua dari kampung yang terdampak dari pesisir pantai utara (kampung Taroy) dan pesisir pantai selatan (Tanah Merah Baru). Selama berada di Tangguh, TIAP bertemu secara terpisah dengan pekerja Papua dan personel yang menjalankan manajemen, operasi, dan program pengembangan tenaga kerja Papua, dan keamanan di kilang LNG. Panel tidak bertemu dengan pejabat kontraktor EPC yang mengelola konstruksi Tangguh dan keamanan serta keselamatannya, tapi bertemu dengan manajer BP yang melakukan koordinasi terhadap aktifitas ini di BP. Panel juga bertemu dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Papua, pembela hak asasi manusia, jurnalis, dan pakar mengenai kondisi politik dan ekonomi di Indonesia dan Papua⁷.

Panel meninjau program-program dan kegiatan BP berdasarkan norma-norma global saat ini yang menghasilkan sejumlah praktik terbaik untuk proyek di negara-negara berkembang. Norma-norma tersebut mencakup Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia; Panduan Organisasi bagi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development- OECD) Bagi Perusahaan Multinasional; Konvensi Organisasi Buruh Internasional Mengenai Penduduk Asli dan Suku-Suku di Negara Merdeka; Petunjuk Operasional Bank Dunia terkait penduduk asli; dan Prinsip-Prinsip Sukarela Keamanan dan HAM AS-Inggris (Prinsip-Prinsip Sukarela Keamanan). Panel juga meninjau Proyek berlandaskan panduan global terbaru yang mencakup Prinsip Panduan PBB di bidang Usaha dan Hak Asasi Manusia ("Prinsip Panduan"); Standar Kinerja IFC di bidang Lingkungan Hidup dan Sosial yang Berkelanjutan; dan Prinsip Ekuator (yang hanya dapat diterapkan secara langsung di lembaga keuangan).

II. Isu-isu yang menjadi perhatian

BP tengah menjalani konstruksi Proyek Pengembangan Tangguh (TEP), dan sedang menghadapi secara langsung tantangan sulit yang melekat dalam mengoperasikan Tangguh dan secara bersamaan membangun Kilang ke- 3, sementara pada saat yang bersamaan berusaha untuk memenuhi komitmennya kepada Indonesia dan masyarakat Papua yang dituangkan dalam AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh. Isu-isu kritis yang melekat selama proses konstruksi termasuk masalah keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan; dan isu-isu yang berkepanjangan tentang masyarakat Papua, termasuk pembangunan sosial dan

⁶ TIAP tidak dapat bertemu dengan Pangdam Papua Barat, atau Kapolres Teluk Bintuni (Polres) yang berpulang tidak lama sebelum kunjungan TIAP, keduanya adalah mereka yang telah ditemui oleh TIAP di kunjungan sebelumnya. Lihat laporan TIAP Desember 2017 hal. 2.

⁷ Lihat Lampiran B untuk daftar pemangku kepentingan yang bertemu dengan TIAP selama kunjungannya Januari 2020. Lihat Lampiran II laporan TIAP Oktober 2012 untuk melihat daftar pemangku kepentingan rinci yang ditemui oleh TIAP, dan laporan selanjutnya untuk melihat daftar pemangku kepentingan yang ditemui untuk kunjungan tertentu.

masyarakat, kapasitas pemerintah daerah dan Dana Bagi Hasil, hubungan dengan masyarakat, pengembangan tenaga kerja Papua, kesehatan dan pendidikan di wilayah tersebut, listrik berbasis jaringan, perumahan pantai utara dan kompensasi berbasis adat.

Dalam banyak hal, BP telah bangkit dan memenuhi semua tantangan ini. Reputasi dan tujuan baik BP antara pemimpin nasional, regional, dan lokal mungkin tidak pernah lebih positif. Pemimpin nasional melihat Tangguh sebagai aset strategis utama dan model bagi pengembangan Teluk Bintuni. Kekhawatiran utama mereka terkait produksi dan pendapatan pemerintah dari Tangguh, namun para pemimpin ini secara umum mendukung pengeluaran BP bagi program-program sosial dan pengembangan tenaga kerja Papua, yang mana mereka lihat peningkatan standar kehidupan dan peluang bagi masyarakat lokal Papua.

Pemimpin regional, yang lebih familiar dengan beberapa program tertentu, secara umum puas dengan program pengembangan BP; percaya bahwa Teluk Bintuni telah menghindari gangguan sipil yang terjadi di tempat lain; dan dukungan yang mengharuskan perusahaan lain memasuki kawasan untuk mengimplementasikan rencana dan program serupa. Bupati, yang sedang menyelesaikan masa jabatan pertamanya tahun ini, merasa senang dengan kemajuan yang ia saksikan sejak 2015, meskipun ada banyak penundaan dan keterbatasan dalam penyelesaian program, yang tidak dikaitkan dengan BP. Bahkan para pemimpin kampung di wilayah pesisir pantai utara, yang menyuarakan keluhannya yang sah, umumnya memiliki pandangan positif tentang dampak Tangguh kepada masyarakat mereka.

Catatan keselamatan BP selama masa konstruksi ini sejauh ini sangat baik, baik itu operasi maupun proyek Ekspansi Tangguh⁸. TIAP melihat budaya "*safety first*" BP di setiap aspek operasi dan pelatihan Tangguh; dan nilai ini telah, sejauh ini, ditransmisikan dan diaplikasikan oleh konsorsium konstruksi CSTS.

Keamanan dan HAM di lokasi konstruksi, ketika lebih dari 15.000 pekerja ada di satu waktu yang sama dan selama itu juga 25.000 – 30.000 pekerja akan bekerja dan hidup bersama, berjalan sangat baik. Hal ini menjadi kekhawatiran TIAP ketika konstruksi dimulai. Meskipun ada perubahan signifikan pada program ICBS, termasuk keberadaan polisi di Tangguh, ada beberapa insiden, hampur tidak ada kekerasan atau gangguan signifikan, tidak ada pelanggaran di dunia maya atau ancaman teroris dan yang paling penting, tidak ada kejadian atau dugaan pelanggaran HAM yang serius. Bahkan ketika puncak kegiatan konstruksi, kebijakan keamanan Tangguh telah mempertahankan kepercayaan masyarakat. (Lihat hal. 26 – 33 di bawah.)

⁸ Lihat Lampiran C untuk informasi lebih rinci mengenai kesehatan dan keselamatan Tangguh



Gambar 1. Program Pelatihan Bersama dengan Polisi di Tangguh LNG

Kinerja lingkungan sangat baik. Hingga saat ini, tidak ada masalah udara, air, atau pembuangan sampah selama masa konstruksi. Kinerja lingkungan BP secara keseluruhan telah mencapai status hijau di bawah sistem penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Panel pemberi pinjaman, yang melakukan tinjauan kepatuhan lingkungan secara detail, tidak menemukan masalah ketidakpatuhan pada tinjauannya yang dilakukan pada 2019 lalu. Dan BP sedang meneliti dan menguji mekanisme untuk mengurangi, menangkap atau memasukan kembali karbon dalam operasi produksi gasnya di masa depan, yang dapat digunakan di Tangguh.

Program sosial dan pembangunan masyarakat, dengan beberapa pengecualian yang signifikan, secara umum telah menghasilkan manfaat yang terukur dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Program pembangunan ekonomi Tangguh telah berkontribusi pada peningkatan kondisi ekonomi masyarakat lokal, termasuk masyarakat asli. Program ini termasuk koperasi sayur dan buah, serta ikan yang menyediakan porsi substansial dari kebutuhan catering Tangguh untuk operasi dan untuk konstruksi Proyek Pengembangan Tangguh; mendanai dan mendukung bisnis baru yang dimiliki dan dioperasikan oleh masyarakat asli yang memproduksi dan menjual pakaian, dan yang memperbaiki peralatan pendingin udara; dan tahun ini mendukung taksi air yang dikelola secara lokal di Teluk Bintuni. (Lihat hlm. 49-50 di bawah.)



Gambar 2. Bisnis Taksi Air yang dijalankan oleh Perusahaan Subitu

Perusahaan-perusahaan ini, yang telah beroperasi, menjanjikan kesuksesan yang lebih besar karena kawasan tersebut saat ini tumbuh dengan cepat dan melakukan industrialisasi dengan operasi migas lain, yaitu Genting Oil dan fasilitas produksi pupuk ke depannya, yang merupakan kebijakan startegis Pemerintah Indonesia.



Gambar 3. Aktifitas Eksplorasi Genting Oil di distrik Sumuri

Dukungan panjang BP untuk pengembangan kapasitas lokal dan regional meskipun kurang merata, telah berkontribusi pada kemajuan pemberlakuan Perdasus Bagi Hasil Daerah yang telah lama tertunda, peraturan yang akhirnya menetapkan formula untuk distribusi peningkatan pendapatan minyak dan gas yang diberikan

kepada Papua di bawah Otonomi Khusus. Hal ini akan mengatur alokasi dan pertanggungjawaban sebagian besar dari pendapatan yang sangat signifikan yang dihasilkan untuk daerah dari Tangguh. Selain mengalokasikan dana untuk kesehatan dan Pendidikan, Perdasus DBH untuk pertama kalinya memberikan pengakuan dan pendanaan untuk program-program adat, yang dijalankan oleh para pemimpin adat, untuk kebutuhan jangka pendek dan panjang. Implementasi di Teluk Bintuni tidak dapat terjadi sampai peraturan daerah (Perdasus) dikembangkan dan disahkan terkait dengan alokasi antar suku, penggunaan, akuntabilitas, dan transparansi. Dukungan teknis dan hukum BP untuk mengembangkan Perdasus ini tetap menjadi prioritas utama untuk mendukung kapasitas. (Lihat hal. 35-37 di bawah ini.)



Gambar 4. Lokakarya Perdasus Migas dengan 3 Kabupaten Penghasil,
Teluk Bintuni, Sorong, dan Raja Ampat

Kemajuan pengembangan tenaga kerja Papua, yang telah menjadi tantangan terbesar BP selama ini, merupakan kesuksesan terbaik semenjak kunjungan TIAP terakhir. Program *Papuan Apprentice*, yang dimulai tahun 2016 untuk mendidik dan melatih pemuda/i Papua untuk menjadi tenaga kerja terampil di Tangguh, telah menghasilkan lulusan pertama yang telah ditempatkan sebagai teknisi tingkat pemula yang terampil. Kelompok (*batch*) kedua dan ketiga program ini saat ini tengah belajar Bahasa Inggris dan dilatih spesialisasi teknis mereka. Semua yang

telah lulus akan bekerja di Tangguh. TIAP bertemu dengan para lulusan dan peserta program, dan terkesan dengan pencapaian, keterampilan, dan semangat mereka untuk sukses di Tangguh.

Setelah berkunjung ke sekolah, Bupati juga terkesan sehingga beliau mendirikan pusat pelatihan di Bintuni yang dikelola oleh kontraktor yang sama, untuk melatih masyarakat Bintuni keterampilan teknis yang lebih dibutuhkan bagi konstruksi dan pengelolaan, seperti *welding*, *scaffolding* and *pipefitting*. Program tiga bulan ini telah menghasilkan 4 kelompok yang terdiri dari 100 lulusan yang telah bekerja bagi CSTS dan proyek konstruksi lainnya. Pusat pelatihan ini memiliki potensi untuk menyediakan banyak pekerja muda dengan keterampilan yang dibutuhkan sebagaimana industrialisasi di Teluk Bintuni.⁹

Program pelatihan tingkat awal ini akan berjalan untuk memenuhi komitmen AMDAL BP yang mewajibkan Tangguh dijalankan oleh 85% tenaga kerja Papua di tahun 2029. Namun tantangan yang signifikan tetap ada terkait dengan kemajuan tenaga kerja Papua ke tingkat manajerial dan penyelia/ penyelia, yang juga menjadi komitmen AMDAL. Tantangan ini sedang diatasi oleh BP dengan adanya *Tangguh Emerging Leadership Program*, yang harus dilanjutkan dan diperluas.

Sementara hal yang telah disebutkan sebelumnya bermanfaat bagi masyarakat Papua, dua program kritis tidak memperlihatkan kemajuan yang signifikan: program listrik dan perumahan di pesisir utara. Kedua program tersebut penting untuk mengatasi ketidakseimbangan aliran manfaat di masyarakat pesisir utara dan selatan; keduanya telah tertunda selama beberapa tahun dengan berbagai tantangan teknis dan institusi; kedua program tersebut merupakan kewajiban AMDAL; namun keduanya di luar kapasitas BP untuk menyelesaikannya.

Listrik merupakan hal yang penting bagi pengembangan ekonomi dan pendidikan. Meskipun BP telah membangun gardu induk 8 MW di tahun 2012, dan kabel PLN telah diletakan di sepanjang Teluk Bintuni di tahun 2015, perluasan listrik berbasis jaringan ke kampung-kampung di pantai utara dan Babo dan beberapa kampung di pantai selatan belum terjadi. Hal ini merupakan kegagalan dari pemerintah, khususnya PLN, dan sebagian besar di wilayah tersebut mengetahui hal tersebut, namun sayangnya hal ini juga mencerminkan komitmen Tangguh dan BP yang buruk. Karena itu, apabila PLN tidak melakukan apapun, BP harus berusaha memperbaiki hal ini sebaik mungkin. Pembangkit listrik sementara atau alternatif harus tersedia di setiap kampung yang tidak dapat dijangkau PLN hingga TEP selesai.

Program perumahan pesisir utara telah melalui serangkaian penundaan, modifikasi, perselisihan politik, dan kendala pasokan. Program ini merupakan bentuk aspirasi masyarakat di pesisir utara sejak pembangunan pemukiman di kampung pesisir selatan di tahun 2005, dan telah menjadi komitmen di dalam

⁹ Lihat <https://papuakini.co/2020/03/02/100-putra-papua-jadi-siswa-baru-angkatan-ke-6-p2tim-teluk-bintuni/> Maret 2020.

AMDAL TEP pada tahun 2015. Sejauh ini, terdapat 21 dari 456 rumah yang telah dibangun.

Seperti halnya listrik, kegagalan implementasi bukan hanya semata-mata karena BP, yang telah menyediakan dana dan desain, dan manajemen konstruksi. Namun program ini telah tertunda beberapa kali karena perselisihan desain, ketidaksepahaman pemerintah, dan ketidakefektifan kontraktor. Salah satu kendala praktis yang signifikan adalah ketersediaan kayu Papua yang legal. Pada saat ini, program ini direstrukturisasi oleh pemerintah kabupaten untuk memungkinkan pengawasan BP yang lebih besar dan kontrak multi-tahun, dengan target penyelesaian baru di tahun 2024. Meskipun penundaan bukan disebabkan oleh BP, hal ini menunjukkan kegagalan tercapainya komitmen Tangguh. Karenanya, BP harus menyediakan kompensasi yang disetujui oleh masing-masing ketiga distrik, seperti tambahan pendanaan perbaikan infrastruktur di setiap kampung, sebagaimana yang dilakukan sebelumnya dalam program *Community Action Plans* ("CAPs").

III. Rekomendasi

A. Keamanan dan HAM

- 1. Pada saat ini ICBS telah dimodifikasi dan polisi telah ditempatkan di Tangguh ("QRF"), BP harus bekerja sama dengan polisi untuk menjamin semua personal di QRF telah menerima pelatihan HAM dari ahli perlindungan HAM yang bersertifikat. BP juga harus meyakinkan Kapolda untuk hanya menempatkan orang Papua dalam program QRF.**
- 2. BP harus menjamin bahwa semua pengawasan dan pelaporan oleh QRF yang sesuai dengan PROSEDUR OPERASIONAL diimplementasikan secara penuh dan semua isu yang timbul dari pelaporan tersebut ditangani dengan tepat dengan pihak kepolisian dan SKK Migas.**
- 3. Meskipun pelatihan gabungan tahunan tidak lagi menjadi komitmen dari pihak keamanan publik, BP harus terus melakukan pelatihan tersebut bagi personel keamanannya dan secara aktif mengajak partisipasi dari Kepolisian dan TNI**
- 4. Semua petugas keamanan Tangguh harus terus menerima pelatihan HAM rutin dari ahli yang berkualitas, dan BP harus secara aktif mendorong Kepolisian dan TNI untuk menyediakan pelatihan serupa bagi personelnnya yang akan bertanggung jawab terhadap kejadian di Tangguh**
- 5. Sebagaimana kegiatan transportasi dan perdagangan meningkat di area sekitar Tangguh, BP harus terus meningkatkan penggunaan *drones*,**

kamera, dan teknologi lainnya untuk mengawasi dan mengamankan parameter Tangguh

6. BP harus waspada terhadap partisipasinya dan dukungannya kepada FKPM, untuk memastikan bahwa forum-forum tersebut tidak mengarahkan perspektif bahwa BP membantu pihak kepolisian dalam mengumpulkan data atau membangun kehadiran polisi di kampung-kampung terdekat
7. Sejauh ini, koordinasi dan pengawasan keamanan dari CSTS telah berjalan dengan baik, baik dalam mencegah pekerja TEP membawa senjata atau barang terlarang lainnya ke dalam site dan dalam mengelola beberapa insiden yang telah terjadi. Kesuksesan ini tidak harus mengarah pada kepuasan. Pelatihan, kewaspadaan, dan hal yang sudah BP lakukan hingga saat ini harus dilanjutkan dengan ketat sebagaimana CSTS terus menurunkan jumlah pekerja TEP
8. BP harus bekerja bersama dengan Bupati, SKK Migas, dan pejabat regional untuk mendorong kewajiban AMDAL yang setara kepada pengembang industri lain di Teluk Bintuni, untuk mengadopsi dan memenuhi pengaturan keamanan, kebutuhan tenaga kerja dan program sosial sebagaimana yang diimplementasikan oleh BP
9. BP harus terus berinvestasi dalam teknologi dan prosedur teknologi keamanan daring dan secara teratur meninjau praktik daring-nya. Semua karyawan yang memiliki akses ke sistem operasi Tangguh harus diberikan pelatihan keamanan dunia maya secara teratur.

B. Pengelolaan Dana Bagi Hasil

1. Mengikuti arahan sesuai dengan Perdasus Papua Barat, BP harus menyediakan dukungan yang sesuai bagi Bupati dan legislatif Teluk Bintuni dalam upaya mereka menyusun draft and implementasi Perdasus yang akan dialokasikan dan mengatur distribusi dana bagi hasil Tangguh ke kabupaten.

C. Pengembangan Tenaga Kerja Papua

1. Program pemagangan Papua merupakan keberhasilan. Saat ini direncanakan memiliki tiga angkatan yang berjumlah 40 orang akan mengisi 120 posisi teknisi tingkat pemula di Tangguh. Karena pentingnya program ini, BP harus secara tahunan mengevaluasi kebutuhannya untuk kebutuhan teknisi ke depannya dan, apabila akan ada peluang bagi teknisi tingkat pemula dalam tiga tahun, BP harus melanjutkan program tersebut dengan jumlah pelajar Papua yang sesuai yang bisa mengisi posisi tersebut.

2. Apabila BP telah berhasil mencapai komitmennya pada tahun 2029, hal ini sama pentingnya dengan BP menyediakan peluang bagi tenaga kerja Papua untuk meningkatkan posisinya ke posisi manajer senior. Untuk menuju tujuan tersebut, manajemen senior harus bertemu dengan perwakilan dari pekerja Papua (*Papuan Steering Committee*) secara rutin ketika mengunjungi Tangguh; mereka harus mendorong para mentor untuk menyediakan bimbingan dan mendukung mentess Papua, dan, dimanapun, mendorong manajer non-Papua untuk mendukung dan mendorong tenaga kerja Papua yang berkualitas di tim mereka
3. Tangguh telah mendirikan program *Tangguh Emerging Leadership Development* dan program *Challenger* yang menyediakan peluang bagi para pelajar Papua lulusan universitas yang berkualitas. Program-program ini membuat masyarakat Papua dapat naik ke jenjang manajemen senior. Untuk mencapai komitmen dimana Tangguh dijalankan oleh mayoritas tenaga kerja Papua di tahun 2029, BP harus memilih setidaknya dua *Challenger* Papua setiap tahunnya, termasuk perempuan diantaranya, untuk menjadikannya sebagai manajer yang terlatih.
4. Untuk memenuhi komitmen tenaga kerja Papua terampil dan manajer di tahun 2029, BP harus meningkatkan penyerapan tenaga kerja Papua eksternal yang berkualitas, berpengalaman untuk memenuhi posisi senior. BP harus memperluas proses penerimaan tenaga kerja di Universitas Papua dan pasar tenaga kerja lain di Papua. Para pekerja Papua juga harus mengetahui apabila ada peluang kerja, agar mereka dapat mendaftarkan diri dan memperluas jaringan bagi pendaftar lain yang berpotensi
5. CSTS sudah memenuhi persyaratan EPC kontrak untuk memperkerjakan tenaga kerja Papua tidak terampil, semi-terampil, dan terampil. Namun gagal dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk mempekerjakan tenaga kerja Papua di posisi manajerial/ penyelia. Hal ini harus ditangani segera. BP harus bekerja dengan CSTS untuk mengimplementasikan penerimaan tenaga kerja tambahan dan menyediakan pelatihan yang sesuai, karena waktu yang semakin sedikit dalam memenuhi tanggung jawab tersebut.

D. Perumahan di Pesisir Utara

1. Komitmen AMDAL untuk membangun rumah-rumah baru di tiga distrik pesisir utara tidak akan selesai ketika TEP selesai. Program ini penting tidak hanya bagi pembangunan kampung, tapi juga untuk mengatasi ketegangan diantara masyarakat di pesisir utara dan selatan yang telah ada selama 15 tahun. BP harus mengambil peran pengawasan yang lebih besar dalam proyek, menempatkan senior manajer yang bertanggung

jawab atas penyelesaiannya, dan mengamankan kayu dari mana pun yang tersedia untuk mempercepat penyelesaian pembangunan.

2. Lebih lanjut, apabila pembangunan rumah tidak diselesaikan tepat waktu, kompensasi perlu diberikan kepada kampung-kampung yang terkena dampak. Bentuknya dapat berupa apapun yang telah disetujui. Satu mekanisme, yang memberikan manfaat kepada semua kampung, adalah dengan memberikan kontribusi pendanaan terhadap perbaikan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemimpin kampung, mekanisme ini sama dengan *Community Action Plans* ("CAPs").

E. Elektrifikasi

1. Listrik berbasis jaringan, yang merupakan komitmen AMDAL, belum diterima oleh masyarakat di kampung-kampung di pesisir utara dan selatan, termasuk Babo, yang mana terletak *base camp* dan bandara BP. BP telah memenuhi komitmennya untuk menyediakan pembangkit listrik, namun PLN belum membangun atau mengaktifkan jaringan listriknya. BP harus mendorong PLN untuk menyediakan infrastruktur ini. Namun hingga PLN berkomitmen untuk menetapkan waktu penyediaan jaringan listrik, BP harus meminta otoritas untuk menyediakan tenaga diesel di Babo selama 24/7, dan atau menyediakan tenaga diesel tambahan, atau menyediakan lampu solar atau pembangkit listrik tenaga solar lainnya bagi semua kampung yang belum dialiri listrik.

F. Pendidikan

1. BP harus tetap melanjutkan dukungan efektifnya bagi pendidikan dasar di Teluk Bintuni melalui mitranya untuk menyediakan bantuan guru, materi, dan komputer bagi pelajar di kampung-kampung yang dicakup di dalam AMDAL.
2. Dalam AMDAL, BP berkomitmen untuk menyediakan setidaknya satu sekolah unggulan di area tersebut, di mana pelajar terbaik dapat belajar dan menyiapkan diri untuk menerima pendidikan yang lebih tinggi. Komitmen ini telah tertunda selama beberapa waktu, baru-baru ini terjadi karena cakupan yurisdiksi bagi sekolah menengah telah dipindahkan dari kabupaten ke provinsi. BP harus dapat memenuhi komitmennya tersebut, bekerjasama dengan pemerintah untuk mendirikan sekolah unggulan baik di pesisir utara dan selatan Teluk Bintuni.
3. BP harus melanjutkan upayanya untuk menyediakan beasiswa melalui SKK Migas kepada pelajar Papua yang berprestasi untuk melanjutkan ke Pendidikan universitas.

G. Kesehatan

1. Pelayanan kesehatan di daerah telah meningkat secara drastis sebagai hasil dari inisiatif BP dan dukungannya bagi program kesehatan di kabupaten. Namun pelayanan kesehatan masih secara signifikan berada di bawah standar nasional. Rumah sakit Bintuni merupakan kunci sukses kemajuan untuk hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. BP harus tetap melanjutkan untuk tetap bekerja sama dengan Bupati untuk memperbaiki fasilitas dan kapasitas rumah sakit untuk menjadi rumah sakit rujukan.

H. Pengembangan Ekonomi

1. Koperasi produksi dan ikan di Teluk Bintuni yang dikelola oleh BP secara umum telah berhasil. BP telah memenuhi kewajiban pembeliannya. Namun CSTS belum memenuhi semua komitmen pembeliannya, sebagian disebabkan oleh keterbatasan logistik dan waktu. BP harus bekerja dengan CSTS dan subkontraktornya untuk menyelesaikan semua isu yang akan menjadi tantangan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Apabila jumlah penyerapan produk tidak tercapai, BP harus mendorong penalti kontrak dan menyediakan kompensasi bagi koperasi kampung.
2. Unit usaha SUBITU yang telah dibina oleh BP merupakan unit usaha yang menjanjikan, dan tetap membutuhkan dukungan BP, setidaknya hingga usaha tersebut mulai beroperasi di Teluk Bintuni dan menyediakan pasar alternatif. BP harus mendukung terbentuknya unit usaha lokal tambahan, seperti usaha jasa cuci/ *laundry*, *scaffolding* dan pemeliharaan.
3. Unit usaha taksi air yang didukung oleh BP merupakan elemen penting di dalam pembangunan ekonomi di Teluk Bintuni. BP harus bekerja sama dengan Bupati untuk memastikan keberlangsungan operasi, dan mencari perusahaan lain yang akan masuk ke daerah tersebut untuk mendukung atau mensubsidi usaha ini.

I. Lingkungan, Pemeliharaan, dan Tampilan

1. Pengawasan BP yang waspada dan berkoordinasi dengan CSTS terhadap perlindungan lingkungan harus tetap berlanjut hingga TEP selesai. Hasil yang baik hingga saat ini tidak bisa menjamin akan ada hingga proyek selesai.
2. BP harus terus melanjutkan untuk mengambil tindakan apapun yang perlu dilakukan untuk mengurangi pembakaran gas, khususnya pada hari yang panas ketika pembakaran membentuk awan hitam.
3. Ketika telah selesai BP, harus melihat kembali hasil dari survei perikanan rutin di Bintuni dan mengambil langkah untuk mengatasi degradasi yang

ditemukan dalam survei tersebut. BP juga harus terus melakukan survei perikanan dua tahunan hingga tahun 2035.

4. BP harus menugaskan manajer senior untuk mengawasi kinerja pemeliharaan fasilitas kontraktornya, dan membutuhkan perbaikan atau pembersihan segera terhadap tanda-tanda kerusakan yang terlihat.

J. Kerjasama dengan Pengembang Lokal

1. BP, dengan bekerja sama dengan Bupati dan Gubernur, harus saling bertukar praktek terbaiknya dengan perusahaan besar lain yang masuk ke Teluk Bintuni, termasuk Genting Oil dan perusahaan Petrokimia, untuk mendorong mereka mengadaptasi kebijakan yang mendukung kebutuhan lokal, khususnya: a) mempekerjakan tenaga kerja Papua yang dilepaskan oleh BP atau CSTS pada saat pembangunan TEP selesai, khususnya petugas keamanan; b) membeli produk, ikan, dan produk makanan lainnya dari koperasi lokal; c) mengadopsi kebijakan ICBS dan menyediakan pelatihan HAM bagi semua petugas keamanan,
2. Bekerja sama dengan Bupati, BP harus menyediakan dukungan di luar yang aktif untuk mendorong perusahaan baru di teluk untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal yang sudah tidak bekerja di operasi BP dan konstruksi TEP.

K. Gas untuk Listrik (*Gas to Power*)

1. Tangguh LNG menyediakan daya pada jaringan listrik ke Papua telah lama menjadi tujuan dan komitmen pada saat ini. BP membangun semua fasilitas fisik yang dibutuhkan untuk mengakomodasi tanker mini di dermaganya. Namun penundaan birokrasi dan kelambanan dari PLN telah menahan implementasi melebihi penyelesaian TEP. BP masih bisa memainkan peran pembangunannya, dan harus menggandeng Gubernur, PLN dan semua pihak yang bertanggung jawab untuk mempercepat aktifasi program, khususnya Papua Barat.

IV. Politik Terkini

Peristiwa politik penting sejak kunjungan TIAP terakhir adalah pemilihan kembali Presiden Joko Widodo ("Jokowi") untuk jabatan paruh kedua dan terakhir. Dia terpilih dengan selisih lebih dari 10 persen dari lawan yang sama, Prabowo Subianto, seorang pensiunan Jenderal dan pemimpin partai nasionalis Gerindra. Walaupun dengan selisih kemenangan cukup jauh, pendukung Prabowo berdemonstrasi di jalan-jalan dan berjuang di pengadilan untuk memprotes dan mencoba menafikan kemenangan Jokowi. Tokoh oposisi populer tersebut, yang didukung sebagian oleh Islamis sektarian, dibungkam oleh pemerintahan Jokowi,

ketika Menteri Koordinator Bidang Keamanan, pensiunan Jenderal Wiranto, “mencekik” atau membungkam internet untuk merusak media sosial yang digunakan untuk menggalang protes dari oposisi¹⁰.

Jokowi menikmati kepuasan publik yang tinggi di jabatan paruh pertamanya, tetapi pemilihannya kembali untuk menjadi presiden tidak mudah. Pada tahun 2017, kekalahan Gubernur Jakarta yang populer, Basuki Tjahaja Purnama (“Ahok”), yang sebelumnya wakil gubernur pilihan Jokowi, dan putusan bersalah dari pengadilan yang menghukumnya dengan dua tahun penjara karena penistaan agama, menimbulkan pertanyaan serius mengenai kekuatan dari pergerakan Islamis dan akibat dari kampanye media sosial bohong terhadap pemilihan presiden¹¹. Sebagai usaha untuk menepis anggapan bahwa dia “kurang Muslim”, Jokowi memilih tokoh agama Islam senior, Ma’ruf Amin, yang juga ketua salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (“MUI”), sebagai calon wakil presiden. Dibawah kepemimpinannya, MUI mendukung legislasi ketat melawan pornografi, dan menyatakan hubungan LGBT sebagai tindakan kriminal¹².

Benar atau tidaknya kampanye sosial media tersebut mempengaruhi pemilihan, tidak cukup untuk merubah hasilnya. Jokowi tidak hanya menang secara nasional, partinya, PDI-P, yang masih dikuasai oleh mantan president Megawati Soekarnoputri, memenangkan kursi terbanyak di DPR, dan dengan partai koalisi lain, memberikan Jokowi mayoritas suara yang solid.

Tidak lama setelah itu, Jokowi mengundang Prabowo bergabung ke pemerintahan¹³. Gerindra menerima tawaran tersebut dan Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Hal ini melebarkan koalisi Jokowi di DPR menjadi 75% dan memarjinalkan partai oposisi. Koalisi besar dan beragam mengharuskan Jokowi mendengar banyak tokoh dalam koalisi. Kabinetnya yang berisi 34 menteri terbagi merata antara para ahli dan pimpinan partai koalisi. Dan Ketua DPR adalah Puan Maharani, putri dari Megawati.

Beberapa inisiatif kebijakan Jokowi di awal paruh kedua pemerintahannya, dan juga beberapa posisi dia di paruh pertama, menimbulkan pertanyaan mengenai kredensial dia sebagai seorang reformis anti korupsi yang tidak berasal dari kalangan elit, hal sama yang membawa dia ke puncak dengan cepat dari Gubernur Jakarta ke Presiden pada tahun 2014. Beberapa minggu sebelum pelantikan

¹⁰ Lihat <https://www.nytimes.com/2019/05/22/world/asia/indonesia-election-riots.html>, New York Times, 22 Mei 2019.

¹¹ Lihat laporan TIAP Desember 2017 hal. 14-15.

¹² Lihat <https://www.abc.net.au/news/2018-08-18/joko-widodo-picks-a-hardline-muslim-cleric-as-his-running-mate/10117820>, ABC News, 17 Agustus 2018.

¹³ Lihat <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/443437/kubu-jokowi-prioritaskan-gerindra-dalam-kabinet-rekonsiliasi?>, Koran Tempo, 25 Juni 2019.

Jokowi, DPR mensahkan sebuah undang undang yang membatasi gerak KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang telah mengusut dan mempenjarakan banyak pimpinan politik terpilih¹⁴. Walaupun hal ini menimbulkan protes besar di jalanan, dan adanya indikasi bahwa Jokowi akan mengeluarkan aturan yang akan membatalkan undang-undang tersebut, Jokowi akhirnya membiarkan undang undang itu berlaku. Juga, DPR mensahkan dan kemudian menunda modifikasi dari undang undang hukum pidana yang akan melarang hubungan intim bagi yang bukan suami dan istri, isu yang juga menimbulkan protes besar di jalan jalan¹⁵. Pelaksanaan undang undang ini telah ditunda, tapi kekuatan-kekuatan agama yang mendorong hal ini tetap tidak berkurang.

Kebijakan domestik Jokowi fokus pada pengembangan infrastruktur, terutama sektor perhubungan, dan pada dua undang-undang “omnibus” untuk mendorong ekspansi bisnis, penciptaan lapangan kerja, menyederhanakan birokrasi, serta mengembangkan industri ekspor dan investasi asing. Jokowi, yang berlatar belakang pebisnis, telah lama mengutarakan pentingnya Indonesia untuk lebih kompetitif dan lebih menarik bagi investasi asing, tetapi Indonesia tetap merupakan negara terburuk di Asia Tenggara dalam hal menarik investasi asing. Tidak ada kejelasan kapan atau dalam bentuk apa inisiatif inisiatif ini akan dilaksanakan, tetapi hal ini sendiri telah menarik banyak revisi yang mungkin akan mengkompromikan tujuan awal dan melindungi kepentingan pribadi atau kelompok.

Walaupun kebijakan luar negeri tidak pernah menjadi prioritas utama Jokowi, tidak seperti pendahulunya SBY, Jokowi menghadapi sebuah tantangan besar tidak lama setelah paruh kedua jabatannya dimulai. Kapal kapal ikan China, di beberapa lokasi, ditemani oleh kapal kapal panjaga pantai China, terlihat bekerja di dalam suatu area yang dikenal dengan Laut Natuna, yang masuk kedalam zona eksklusif ekonomi Indonesia, yang di klaim China bagian dari “garis putus-putus sembilan”. Jokowi bereaksi dengan mengirimkan kapal kapal ikan dan Angkatan Laut Indonesia ke wilayah tersebut dan tampil untuk menyatakan kedaulatan Indonesia terhadap wilayah tersebut¹⁶. Hal ini merupakan sebuah tantangan kebijakan luar negeri, tetapi karena besarnya populasi minoritas China di Indonesia dan sejarah serangan anti-China, hal ini berpotensi menimbulkan sentimen anti-China yang berlanjut kepada meningkatnya tensi domestik atau kekerasan.

Prioritas dan kebijakan sektor energi Jokowi merupakan jaring kepentingan kepentingan politik yang berlawanan. Terlalu kompleks bagi TIAP untuk

¹⁴ Lihat <https://jakartaglobe.id/news/house-approves-new-kpk-leadership/>, Jakarta Globe, 16 September 2019.

¹⁵ Lihat <https://www.nytimes.com/2019/09/30/world/asia/indonesia-protests-joko-widodo.html>. New York Times, 30 September 2019. Presiden Joko Widodo menghadapi tekanan untuk mencabut undang-undang upaya anti-korupsi dan tindakan yang melarang aborsi dan hubungan seksual di luar pernikahan.

¹⁶ Lihat <https://www.fpri.org/article/2020/01/the-next-front-china-and-indonesia-in-the-south-china-sea/>. FPRI, 27 Januari 2020.

menjabarkan dalam laporan ini dengan rinci. Ada beberapa tema yang muncul: Pertama, perluasan Badan Umum Milik Negara (“BUMN”), terutama Pertamina. Perjalanan karir Menteri Energi, Arifin Tasrif, berada sekitar BUMN; dia merupakan penunjukan politik dan tidak mempunyai pengalaman di sektor swasta. Banyak kekuatan mendorong pengembangan Pertamina menjadi perusahaan milik negara papan atas, seperti Petronas atau Sinopec. Hal ini merupakan konflik langsung dengan upaya menarik investasi minyak dan gas swasta. Jokowi telah menempatkan Ahok (mantan gubernur Jakarta) sebagai komisaris Pertamina, menandakan sebuah upaya menahan korupsi dan ketidakefisienan dalam Pertamina. Akan tetapi hal ini merupakan masalah masalah dalam dan mengakar, dan para pimpinan nampaknya kurang memahami mengapa produksi di lapangan-lapangan yang ada terus menurun sebagaimana Pertamina mengoperasikan lebih banyak proyek yang sebelumnya dikelola swasta.

Kedua, ekspansi penggunaan gas alam, khususnya di Jawa. Jokowi dengan jelas melihat bahwa gas alam merupakan bagian dari solusi bagi penurunan produksi minyak dan naiknya impor minyak. (Bagian lain adalah penggunaan lebih besar dari energi terbarukan, terutama biofuels). Akan tetapi, meskipun dengan kebijakan tersebut, hampir semua dari pembangkit listrik baru di Indonesia akan menggunakan batubara, yang kemungkinannya kecil untuk berubah dikarenakan kekuatan besar dari oligarki industri batubara. Selain itu, jaringan infrastruktur gas juga jauh dari mencukupi, serta pasokan tambahan dari domestik masih jauh. Juga, ada tekanan politik yang cukup besar dari kepentingan konsumen, seperti Kamar Dagang Dan Industri (“Kadin”), untuk menekan harga gas rendah, lebih rendah dari harga pasar. Kecuali upaya upaya tersebut mengarah kepada perubahan kontrak Tangguh LNG yang ada (yang tidak disebutkan kepada TIAP), kebijakan kebijakan ini seharusnya tidak berdampak langsung kepada Tangguh umumnya dan Train 3 khususnya.

A. Papua Barat Terkini

Sampai akhir 2017, kebijakan Papua Jokowi secara umum melanjutkan fokus jabatan paruh pertamanya pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi, Bersama sama paling tidak dengan perhatian retorik kepada pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran lainnya di masa lalu. Jokowi sering kunjungi Papua untuk menyampaikan kebijakan inklusi dan pembangunannya, tetapi tidak menindaklanjuti janji janji sebelumnya mengenai pemberian grasi dan pembebasan tahanan politik, atau mengenai penghapusan kewajiban bagi warga negara asing untuk mendaftar dan mendapat persetujuan pemerintah (“SKI”) sebelum berkunjung ke Papua.

Selama sebagian besar periode sejak laporan terakhir TIAP, kebijakan Papua Jokowi didominasi oleh penghentian kontrak kerja Freeport dan upaya untuk mentransfer 51% kepemilikan Freeport kepada pemerintah pusat Indonesia,

Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Sampai nasionalisasi pembayar pajak terbesar di Indonesia ini diselesaikan tahun 2018, hal ini, yang di ikuti secara luas oleh media di Indonesia, membayangi semua aspek lain dari kebijakan Papua Jokowi¹⁷.

Pada bulan Desember 2017, Presiden menerbitkan keputusan lain yang memperluas tujuan tujuan pembangunan di Papua¹⁸. Instruksi Presiden No. 9/2017 mengenai percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan Papua Barat difokuskan kepada sektor kesehatan dan Pendidikan, dan termasuk pembangunan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital dan konektivitas. Aturan baru ini secara garis besar menambah pendidikan dan kesehatan dalam prioritas pembangunan, dan juga mencari bentuk pembangunan berdasarkan rasa hormat terhadap budaya, kebiasaan dan kepentingan masyarakat asli Papua.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (“Bappenas”) menjelaskan intruksi baru ini akan fokus pada pendidikan dalam rencana pembangunan pemerintah bagi Papua dan Papua Barat, menjabarkan delapan tujuan pendidikan khusus; menyebarkan Kartu Indonesia Pintar (“KIP”) lebih banyak, meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah menengah tinggi, mempersiapkan bantuan bagi guru guru, meningkatkan jumlah guru, menyediakan pembelajaran online bagi guru, termasuk konten lokal dalam pendidikan, memberantas buta huruf dan mendirikan sekolah asrama.

Situasi relatif tenang di Papua yang telah berlangsung selama kepresidenan Jokowi berubah pada tanggal 2 Desember 2018, ketika pekerja kontruksi jalan raya Trans Papua melalui daerah Pegunungan Tengah diserang, ditawan dan dibunuh oleh pemberontak bersenjata. Lebih dari 20 pekerja binasa, dan lebih banyak lagi penduduk sipil yang ditahan dan dibunuh melalui penyelidikan dan tanggapan dari peristiwa tesebut oleh polisi dan TNI¹⁹. Meskipun banyak ancaman mengenai serangan lanjutan, Jokowi berjanji untuk menyelesaikan kontruksi jalan raya, teknisi dari militer mengambil alih pembangunan kontruksi²⁰.

Meskipun serangan serangan khusus ini terbatas pada wilayah Pegunungan Tengah, yang telah lama menjadi sumber aktivitas separatist, tensi yang memanas

¹⁷ Menurut perjanjian, Freeport dan Anglo- Australia Rio Tinto akan menjual saham mereka dan keuntungan mereka di perusahaan gabungan Freeport Indonesia, yang mengelola tambang Grasberg, menjadi perusahaan sumber daya milik negara, Inalum – Indonesia Asahan Aluminium. Lihat <https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Commodities/Indonesia-mine-nationalization-shakes-top-copper-producer>, Asia Review, 18 Juni 2018.

¹⁸ Ini mengikuti beberapa inisiatif sebelumnya di bawah Jokowi dan SBY, termasuk Kesepakatan Baru di Papua di tahun 2008 dan UP4B – Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat di tahun 2012.

¹⁹ Lihat <https://www.bbc.com/news/world-asia-46446719>. BBC News, 5 Desember 2018.

²⁰ Lihat <https://apnews.com/a86eaa810748496ba94644187cf9be88>. AP News, 28 Maret 2019.

antara orang Papua secara umum dengan saudaranya dari bagian Indonesia lain meledak dalam kekerasan pada bulan Agustus – September 2019. Kekerasan ini ditimbulkan oleh kejadian yang melibatkan beberapa mahasiswa Papua di Surabaya, yang tidak melakukan hormat terhadap bendera Indonesia pada Hari Kemerdekaan, dan menjadi sasaran ejekan bernada rasis oleh mahasiswa lain dan kemungkinan oleh beberapa anggota TNI. Meskipun permintaan maaf disampaikan Gubernur Jawa Timur dan juga pihak lain, demonstrasi yang disertai kekerasan berlangsung di Papua dan Papua Barat, termasuk Manokwari, Sorong dan Fakfak, tiga kota terdekat dari Tangguh. Akhir Agustus, demonstrasi dengan kekerasan, pembakaran dan perusakan telah menyebar ke hampir semua kota di Papua, serta kota-kota lain yang ada kelompok mahasiswa Papua.

Beberapa kejadian kekerasan tersebut ada yang dimulai atau didorong oleh Komite Nasional Papua Barat (“KNPB”), kelompok separatis yang berbasis di Oxford, Inggris, dan dipimpin oleh Benny Wenda. Kelompok ini sebelumnya telah merencanakan protes berbarengan dengan pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tanggal 9 September di Jenewa, untuk mempertanyakan kedaulatan Indonesia terhadap Papua. Apapun penyebabnya, kekerasan di Papua memburuk, menewaskan lebih dari 30 orang, kebanyakan imigran, di Wamena, dan yang lainnya, kebanyakan mahasiswa Papua, terbunuh dan terluka di Jayapura. Pemerintah Indonesia merespon dengan membungkam internet selama beberapa hari, untuk membatasi kemampuan para aktivis untuk berkomunikasi dan mengadakan; dan dengan menangkapi para aktivis²¹.

Secara khusus, demonstrasi dengan kekerasan yang tersebar di Papua dan Papua Barat tidak terjadi di Bintuni, Babo atau komunitas yang lebih kecil lainnya di Kabupaten Teluk Bintuni. Ada sebuah demonstrasi damai di Bintuni, tapi TIAP tidak mendengar peristiwa lainnya atau adanya tensi yang meningkat di Teluk Bintuni sebagai hasil dari kejadian dengan kekerasan di banyak tempat lain.

Peristiwa kekerasan tersebut telah berlalu, untuk sekarang, dan penyebab penyebabnya, secara politik, etnis dan agama, terlalu rumit untuk dibahas dengan rinci dalam laporan ini. Akan tetapi, tanggapan dari pemerintahan Jokowi sejauh ini belum menjawab penyebab dasar berbau rasisme yang mendasari kejadian kekerasan tersebut, tetapi meneruskan pembangunan sosial dan ekonomi, dengan melalui beberapa kemungkinan modifikasi.

Pertama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang pernah menjabat Kapolda Papua dan Kapolri, telah secara tentatif menyetujui pemekaran provinsi baru dari Papua, disebut Papua Selatan, dan beberapa kabupaten baru. Hal ini kemungkinan

²¹ Lihat <https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/24/21-killed-amid-fresh-unrest-papua.html>. The Jakarta Post (p.1), 24 September 2019.

tidak akan terjadi tanpa disetujui oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang lebih mewakili kepentingan orang Papua daerah pegunungan daripada orang Papua daerah pesisir.

Kedua, Karnavian juga mengusulkan pemilihan lokal di beberapa kabupaten di daerah Pegunungan Tengah tidak lagi dilakukan secara langsung, tapi dengan penunjukan atau pemilihan tidak langsung. Kemungkinan langkah mundur ini berasal dari hasil pemilihan langsung dengan menggunakan sistem token, atau noken, oleh kepala kepala suku yang dalam memilih mewakili suara seluruh kampung. Sebagai contoh, pada tahun 2019 Jokowi menang 100% suara dari lima kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah. Sebagai tambahan, angka-angka statistik kemungkinan telah dibesar-besarkan di kabupaten kabupaten tersebut untuk meningkatkan keterwakilan mereka di DPRD Papua dan untuk meningkatkan alokasi dana kepada distrik-distrik di daerah tersebut²².

Di satu sisi, kemungkinan ini merupakan perubahan besar di Papua, tetapi TIAP tidak melihat diskusi mengenai perubahan tersebut di Papua Barat.

Ketiga, pada tahun 2021, dana otonomi khusus, atau Otsus, akan berakhir setelah 20 tahun. Aturan lain dalam Otonomi Khusus, termasuk persyaratan bahwa gubernur dan bupati harus berasal dari orang Papua asli; keberlanjutan Majelis Rakyat Papua ("MRP"), dan pembagian pendapatan dari pengelolaan kekayaan alam dengan yurisdiksi lokal dengan formula yang jauh lebih baik daripada provinsi provinsi lain, akan tetap berlanjut tanpa dibutuhkan adanya legislasi baru. Dana Otsus, yang mengalokasikan 2% of dana alokasi umum ke Papua, telah mendistribusikan tambahan dana triliunan untuk Papua. Otsus bukannya tanpa kontroversi; banyak yang menuduh sejak pertama kali diberlakukan bahwa dana tersebut disalahgunakan dan disalurkan kepada kaum elit, dan tidak memberikan manfaat rakyat banyak. Tidak terlihat adanya kepentingan atau kemauan untuk mereformasi Otsus, dan Pemerintah Indonesia berencana menyerahkan legislasi untuk memperpanjangnya, dan kemungkinan menambahnya. Apabila legislasi tidak disahkan pada tahun 2020, TIAP mendapat informasi bahwa pemerintahan Jokowi dapat dan akan memperpanjangnya secara sepihak.

Baik Gubernur dan Bupati mencalonkan dirinya kembali tahun ini. Keduanya hampir menyelesaikan masa jabatan pertamanya. Keduanya puas dengan hubungan komunitas dan program program pembangunan BP/Tangguh. Keduanya menggaris bawahi peran masing-masing dalam beberapa program pembangunan sosial dan komunitas Tangguh dan pencapaian pencapaian lain yang berhubungan dengan Tangguh. Gubernur (dan Wakil Bupati) berpartisipasi dalam perayaan

²² Lihat <https://www.cseashawaii.org/2019/10/ipac-report-60-numbers-matter-the-2020-census-and-conflict-in-papua/>. Laporan IPAC no. 60, 29 Oktober 2019.

gunting pita penyelesaian beberapa rumah pertama dalam program Perumahan Pesisir Utara (lihat foto 5 dan 7 dan pp.37-38 dibawah); Gubernur dengan bangga merayakan penyelesaian DPR Perdasus; Bupati menyebut pusat pelatihan teknis di Bintuni, yang mencontoh program pelatihan pemagangan BP (see pp.44-46 dibawah), salah satu pencapaiannya yang paling signifikan; dan Bupati bermaksud mendirikan sekolah sekolah tambahan dengan menggunakan “sekolah model” BP di Tanah Merah Baru sebagai contoh (lihat pp.52-54 dibawah).



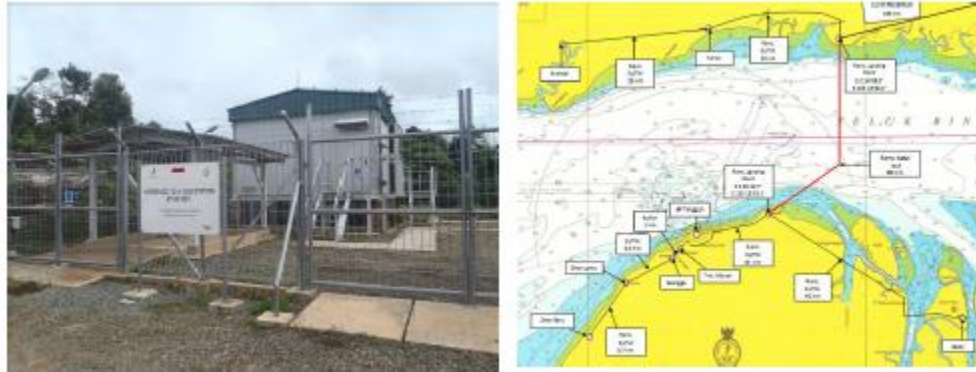
Gambar 5. Upacara Penyerahan rumah yang sudah direnovasi kepada masyarakat di pesisir utara



Gambar 6. Program Teknisi Tangguh bagi anak muda Papua

Secara ekonomi, walaupun Papua Barat tetap merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia, Teluk Bintuni terus tumbuh dan, dengan beberapa pengecualian seperti Perumahan di Utara dan listrik (lihat pp.44-48 dibawah), kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakatnya terus meningkat. Dalam berbagai indikator, parameter keluaran kesehatan dan pendidikan terus meningkat dan partisipasi masyarakat asli dalam perdagangan juga meningkat. Cukup mengagetkan, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional oleh Badan Pusat Statistik

("BPS") menempatkan Teluk Bintuni di ranking kedua dari 20 kabupaten termakmur di Indonesia. Dalam survei tersebut, hanya Jakarta Pusat, pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan seluruh Indonesia, yang mempunyai ranking lebih baik dari sisi per kapita PRB²³.



Gambar 7. Infrastruktur listrik yang sudah dibangun yang akan menyediakan listrik ke Teluk Bintuni dan Rencana jaringan listrik Teluk Bintuni oleh PLN

Memang ukuran-ukuran aktivitas ekonomi dan kemakmuran dengan jelas meningkat selama periode TIAP, tetapi sulit dipahami bahwa Kabupaten Teluk Bintuni mendapat nilai begitu tinggi dalam suatu ranking pemerintahan yang resmi. Sebagai contoh, pada tahun 2015, Bupati memperkirakan 40% dari populasi hidup dibawah garis kemiskinan, turun dari sekitar 60% pada tahun 2005²⁴. Perhitungan PRB lokal harus menyertakan seluruh atau suatu porsi penting dari pendapatan pengelolaan sumber daya alam yang dihasilkan Tangguh dan bantuan langsung Otsus dan dana Otsus lainnya; dan populasi Teluk Bintuni, meskipun tumbuh dengan cepat, hanya berada dalam kisaran 70,000. Angka angka jelas menunjukan bahwa dana dana signifikan mengalir ke kabupaten. Tetapi dana dana tersebut tidak tersalurkan merata, dan dalam banyak kasus sama sekali tidak mencapai kampung kampung. "Kekayaan" Teluk Bintuni, walaupun tertera secara statistik, tidak meresap kebawah ke masyarakat asli di daerah daerah, termasuk daerah yang secara langsung terdampak oleh Tangguh.

²³ Lihat <https://www.solopos.com/jangan-iri-ini-kabupaten-termakmur-di-indonesia-1042782>. Solopos, 21 Januari 2018. Sesuai dengan laporan ini, data ranking kabupaten paling sejahtera dibuat di tahun 2018. Tingkat kesejahteraan di kota atau kabupaten diperhitungkan berdasarkan indikator pendapatan perkapita, yang pada gilirannya dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan total populasi di area.

²⁴ Lihat laporan TIAP Desember 2015 hal. 23.

V. Keamanan dan HAM

Keamanan yang efektif bersamaan dengan perlindungan HAM telah dan tetap menjadi salah satu tantangan di Tangguh. Sejauh ini, BP telah memenuhi tantangan ini dengan melindungi Tangguh dari berbagai pelanggaran fisik dan cyber yang signifikan tanpa menyebabkan insiden atau dugaan pelanggaran HAM oleh petugas keamanan publik atau swasta.

Pembentukan dan implementasi Keamanan Terintegrasi Berbasis Masyarakat ("ICBS") telah lama menjadi fokus TIAP. Hal ini merupakan prinsip yang fundamental 3 lapis yang merespons setiap pelanggaran yang telah bekerja secara efektif selama hampir 15 tahun. Di bawah program ICBS, petugas keamanan swasta Tangguh bertanggung jawab untuk semua kecuali pelanggaran signifikan, sebelum memanggil polisi Papua untuk menanggapi insiden besar yang tidak dapat mereka tangani, dan hanya akan memanggil TNI apabila tanggapan dari polisi tidak memadai. Selain itu, ICBS telah mewajibkan semua personil keamanan yang mungkin akan dipanggil untuk mendukung keamanan Tangguh telah dilatih sesuai dengan Prinsip Sukarela Keamanan dan HAM ("VPHR") hingga saat ini dan semua unit keamanan mengadakan pelatihan Bersama untuk membiasakan para komandan dengan insiden yang terjadi dan tanggapain yang sesuai.²⁵

Sejak tahun 2014-2018, hubungan antara keamanan Tangguh dan polisi Papua disepakati di dalam persetujuan, JUKLAP/PAMBERS, yang telah diimplementasikan dalam ICBS di bawah payung kesepakatan antara Polisi dan SKK Migas. TIAP telah menyatakan keprihatinannya mengenai kemungkinan adanya amandemen perjanjian ini yang dapat meningkatkan keberadaan polisi atau TNI di dekat Tangguh. Keprihatinan ini meningkat dengan adanya pertama, pembentukan Kapolda (Kepolisian Daerah) di Papua Barat pada 2014; kedua, pembentukan Pangdam (Panglima Komando Daerah Militer) di Papua Barat tahun 2017²⁶; ketiga, kenaikan tingkat komando TNI di Bintuni menjadi Kodim; dan keempat, pembentukan armada Angkatan Laut di Sorong tahun 2018. Kekhawatiran TIAP berkaitan dengan meningkatnya kehadiran pihak keamanan umum, bersamaan dengan meningkatnya serangan teroris di bagian Indonesia lain dan masukan jumlah tenaga kerja yang akan datang ke site untuk bekerja di konstruksi TEP, membuat TIAP merekomendasikan beberapa perbaikan dan peningkatan kualitas pada pihak keamanannya dan koordinasinya dengan keamanan CSTS²⁷. Banyak di antara rekomendasi tersebut ini telah dilakukan.

²⁵ Pembentukan, implementasi dan evolusi ICBS telah didetailkan di dalam setiap laporan TIAP sebelumnya, termasuk ancaman terhadap integritasnya dari Polisi atau TNI yang menginginkan peran langsung dalam keamanan Tangguh. Lihat laporan TIAP Maret 2009 hal. 12-17; Laporan TIAP Desember 2015 di hal. 25-29.

²⁶ Lihat laporan TIAP Desember 2015 hal. 26

²⁷ Lihat laporan TIAP Desember 2017 hal. 22-25

Namun, perubahan tambahan juga dibuat untuk memodifikasi konsep dasar ICBS dan bentuk dari JUKLAP/PAMBERS. Di bulan Maret 2018, kesepakatan tersebut diganti dengan Kontrak Kerjasama (“KKS”) antara Kapolda dan SKK Migas. Tidak seperti JUKLAP yang sebelumnya, BP tidak secara langsung bagian dari kesepakatan ini, walaupun merupakan pihak yang menjalankan Prosedur Operasinya (“PROSEDUR OPERASIONAL”).

Secara signifikan, KKS membentuk unit polisi kecil, disebut sebagai *Quick Response Force* (“QRF”) yang ditugaskan di LNG site selama waktu yang tidak ditentukan. Ini merupakan pertama kali ada pihak keamanan publik yang ditempatkan di Tangguh²⁸. Terdapat poin perlindungan HAM di dalam PROSEDUR OPERASIONAL, yang mewajibkan setiap petugas keamanan yang ditugaskan di QRF harus dilatih dalam VPHR dan elemen lain dalam melindungi HAM, bahwa HAM tetap dilindungi di dalam setiap keadaan darurat, dan respons dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan secara bertahap²⁹. KKS juga mencakup persyaratan pembayaran bagi jasa polisi secara detail oleh SKK Migas, yang mana pembayarannya ditagihkan kembali ke Tangguh³⁰. Jadi, meskipun Tangguh membayar semua jasa keamanan ini, semua biaya dan pengeluaran dibayarkan sesuai, terbatas, dan transparan.

PROSEDUR OPERASIONAL merinci tanggung jawab bagi pengelolaan resiko keamanan. Mereka mengklasifikasikan keadaan keamanan sebagai: a) sebuah kondisi aman yang dapat diatasi oleh pihak keamanan Tangguh LNG, yang mengelola tanggung jawab keadaan keamanan dan berkerjasama dengan QRF; b) sebuah kondisi rentan yang masih bisa diatasi oleh pihak keamanan Tangguh LNG, dan yang mengelola tanggung jawab keadaan keamanan dan berkerjasama dengan QRF; c) sebuah kondisi yang sangat rentan yang berpotensi menghentikan konstruksi, operasi, dan/ atau aktifitas lainnya yang berkaitan dengan operasi Tangguh, seperti anarkis, penahanan, penyanderaan, yang dilakukan oleh anggota masyarakat, atau pekerja atau kontraktor dan orang lain yang mencurigakan, dalam hal ini QRF dapat memberikan tindakan yang diperlukan; d) apabila terjadi eskalasi situasi, pihak keamanan Tangguh LNG bisa meminta bantuan dari QRF, dan apabila QRF tidak dapat mengatasi situasi tersebut maka pemimpin QRF dapat meminta bantuan dari pihak Kepolisian Daerah Papua Barat; dan apabila menanganannya dibutuhkan bantuan keamanan yang lebih besar, polisi dapat meminta bantuan keamanan dari TNI, walaupun pengendalian situasi tetap berada di tangan pihak Kepolisian Nasional Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku³¹.

²⁸ Kapolda sebelumnya telah menyarankan kepada TIAP bahwa unit kecil perlu ditempatkan di Tangguh karena diperlukan waktu yang lama untuk menanggapi insiden darurat di site, sebuah pemikiran yang juga disampaikan oleh Kapolda dan Pangdam sebelumnya. Lihat laporan TIAP Desember 2017 hal. 18

²⁹ Lihat Prosedur Operasi mengenai Satuan Tugas Keamanan Perlindungan Objek Vital Nasional (SATGAS PAMOBVIT) di wilayah kerja Tangguh, 16 Juli 2018; dan PEDOMAN KERJA; Penggunaan Kekuatan, Satuan Tugas Perlindungan Objek Vital.

³⁰ Lihat KKS bagian 8.1 Pembayaran dan Metode Pembayaran.

³¹ Id. Bagian 1.

Penggunaan berbagai tingkat respons untuk berbagai tingkat ancaman serupa dengan kriteria yang digunakan dalam perjanjian sebelumnya yang diterapkan ICBS. Namun, tidak serupa dengan ICBS, penentuan tingkat kerentanan di fasilitas terhadap ancaman tertentu tidak didelegasikan kepada pihak keamanan BP, tapi situasi rentan tersebut ditujukan ke Polisi dan SKK Migas. Maka, untuk pertama kali, mungkin saja polisi dapat menanggapi insiden keamanan yang pihak pengelola keamanan Tangguh percaya tidak memerlukan tanggapan dari polisi.

Untuk memastikan persyaratan *Standard Operational Procedure* (SOP)/ Standar Operasional yang taat, terdapat ketentuan yang diperluas untuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. QRF harus menyimpan catatan harian, mengajukan laporan mingguan ke Kepolisian Daerah dan keamanan Tangguh, dan menyerahkan laporan bulanan ke SKK Migas dan laporan khusus untuk setiap situasi yang rentan. Selain itu, evaluasi kinerja harus dilakukan setiap triwulan oleh keamanan Tangguh dan QRF dan setiap dua tahun sekali oleh Kepolisian Papua Barat dan SKK Migas. SKK Migas harus memperbaharui seluruh perjanjian setiap tahun³².

QRF telah bekerja sejak pertengahan 2018, dengan terdiri dari 10 orang petugas, mayoritas berasal dari Papua³³. Polisi ini mengenakan seragam, mereka berpartisipasi dalam melakukan patrol harian dengan *Security Response Team* (SRT) di wilayah luar pagar, dan mereka berlatih dengan tim tanggap BP secara mingguan. Jika tidak, mereka tidak berpartisipasi dalam aktifitas rutin pihak keamanan Tangguh atau melakukan patroli ke kampung-kampung. Hingga saat ini, tidak terdapat catatan insiden buruk yang melibatkan QRF melibatkan pekerja Tangguh atau TEP; banyak pekerja Tangguh yang bahkan tidak menyadari keberadaan QRF.

Meskipun kehadiran QRF terbatas dan dibatasi, masih ada tekanan bagi polisi dan TNI, baik Angkatan darat dan Angkatan laut, untuk meningkatkan kehadiran mereka di daerah tersebut ke depannya, sebagian karena industrialisasi yang berkelanjutan dan pertumbuhan di Teluk Bintuni. Hal ini telah dimulai dengan pembentukan Kodim TNI baru dan kehadiran Angkatan udara. Sejauh ini, QRF telah bekerja, dan tidak ada alasan untuk berharap bahwa QRF tidak dapat terus berfungsi tanpa insiden buruk apabila terus berada di Tangguh secara permanen. Namun, penting bahwa BP tidak mengorbankan prinsip-prinsip penting dalam ICBS – termasuk sistem tanggapan tiga tingkat untuk setiap ancaman keamanan atau insiden dan pelatihan HAM rutin dari semua petugas keamanan, yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat – untuk kebutuhan tambahan atas petugas keamanan publik untuk meningkatkan kehadiran atau peran mereka di keamanan Tangguh.

³² Lihat Laporan dan Evaluasi Panduan Kerja, Satuan Tugas Perlindungan Objek Vital; KKS, Pasal 12.

³³ Tidak semua personil QRF harus berasal dari Papua, namun Kapolda sejauh ini menempatkan personil dari Papua di site.

Mengelola keamanan tanpa insiden selama masa konstruksi TEP tetap dan akan menjadi tantangan yang signifikan. Terdapat lebih dari 14.000 pekerja TEP di site pada saat kunjungan TIAP. Pekerja ini diperiksa oleh CSTS, dan petugas keamanan yang bekerja dikelola oleh CSTS, menggunakan Gardatama, kontraktor keamanan yang sama yang digunakan oleh BP. CSTS menyiapkan rencana keamanan yang komprehensif, sesuai dengan persyaratan BP, yang rinci dan menjelaskan mengenai kebijakan keamanannya. Penting bahwa CSTS mengimplementasikan rencana ini seperti yang diminta BP, dan setiap petugas keamanannya akan dilatih dengan cukup untuk mengelola berbagai situasi³⁴.

Sejauh ini, koordinasi dan implementasi telah berjalan dengan baik. Melalui pertemuan harian dan konsultasi dengan manajemen senior, tidak ada pelanggaran keamanan diantara pekerja TEP. Sejak tahun 2018 dan 2019, telah terjadi 51 kasus pelanggaran di tempat kerja, dan hanya dua dugaan pelecehan seksual atau kekerasan, yang telah dihukum dengan diberhentikannya pelaku. Tidak ada pelanggaran dengan melibatkan membawa senjata, selain pisau kecil, ke dalam site, dan tidak ada insiden yang membutuhkan tanggapan dari polisi³⁵. Mengingat banyaknya pekerja CSTS dan kedekatan mereka satu sama lain, ini merupakan catatan yang luar biasa. Jelas, CSTS sejauh ini telah menjalankan kewajiban kontrak keamanannya dengan serius dan telah mengimplementasikannya dengan cermat.

Insiden keamanan yang paling signifikan terjadi di luar lokasi, di kampung-kampung terdekat, biasanya terkait dengan masalah personil atau upah pekerja, termasuk rekrutmen CSTS untuk TEP. beberapa protes termasuk 'penahanan' kapal, dimana para pekerja mencegah pekerja BP atau kapal pasokan berangkat ke Tangguh. Beberapa membutuhkan bantuan dari polisi untuk menyelesaikannya. Ada juga protes dari beberapa suku setempat yang mengklaim hak atas kompensasi adat, yang paling menonjol adalah lapangan terbang Babo. Semua telah diselesaikan dengan damai. Sejauh ini, koordinasi dengan dan pengawasan petugas keamanan CSTS telah berjalan dengan baik, baik dalam hal mencegah pekerja TEP membawa senjata atau barang selundupan lainnya di lokasi dan dalam mengelola beberapa insiden yang telah terjadi. Keberhasilan ini tidak harus mengarah pada kepuasan. Pelatihan, kewaspadaan, dan proses yang telah dilakukan BP sampai saat ini harus dilanjutkan sama kerasnya dengan CSTS menurunkan jumlah pekerja di TEP.

BP juga telah melembagakan program baru lain dalam strategi pelibatan masyarakatnya: Sosialisasi Pengamanan Masyarakat dan Forum Kerjasama Pengamanan Masyarakat (FKPM). Program ini ditujukan di kampung-kampung setempat, diberikan kepada orang dewasa dan pelajar, dengan melibatkan kolaborasi antara BP dan polisi lokal. Mereka dirancang untuk memberikan edukasi bagi masyarakat lokal mengenai isu keamanan dan keselamatan, termasuk

³⁴ Lihat Laporan TIAP Desember 2017 hal. 20-22.

³⁵ Gangguan yang paling signifikan ada selama Pemilu Nasional, ketika surat suara tidak tersedia bagi semua pekerja Indonesia, dan beberapa protes terjadi. Hal ini diselesaikan tanpa adanya kekerasan.

kekerasan rumah tanggm terorsisme, zona terbatas terlarang, sosialisasi TEP, pembangunan BOF, kebijakan pelanggaran batas wilayah darat Tangguh, dan mencegah radikalisme. Ini semua bisa menjadi topik yang baik untuk mengedukasi masyarakat di sekitar Tangguh tentang bahaya yang berpotensi. Mereka juga memfasilitasi polisi dalam pengumpulan data dan mengidentifikasi masalah untuk membantu melaksanakan fungsi polisi secara umum (yaitu, mengumpulkan intelejen). Forum tidak harus menempatkan personil di kampung. Kehadiran polisi atau keamanan publik lainnya di kampung-kampung setempat tidak pernah sebelumnya secara aktif didukung atau didorong oleh BP, selain patroli marinir gabungan di Tanah Merah Baru untuk membantu mengelola zona terbatas terlarang. Jika pemisahan kehadiran polisi dari kampung tetap menjadi prinsip panduan ICBS, penting bahwa partisipasi dan dukungan BP terhadap program-program FKPM terbatas pada koordinasi forum-forum ini dan tidak memfasilitasi kegiatan atau kehadiran polisi yang lebih besar di kampung-kampung terdekat.

Seiring industrialisasi Teluk Bintuni berlanjut, hampir dapat dipastikan bahwa ukuran petugas keamanan publik akan meningkat, dan bahwa perusahaan lain yang beroperasi di wilayah tersebut mungkin bukan merupakan yang berpihak pada VPHR atau mungkin tidak menghargai HAM dan menggunakan tekanan setinggi BP. Hal ini pasti akan menambah tekanan terhadap BP untuk mengakomodasi kepentingan personil keamanan, seperti yang diperlukan dalam pembentukan QRF. Setiap tekanan untuk meningkatkan personil keamanan di lokasi LNG atau kampung-kampung terdekat harus dilawan, terutama setelah selesainya TEP dan mobilisasi ribuan tenaga kerja non-Papua.

Selain itu, penting untuk melanjutkan dan secara rutin mengulang pelatihan HAM yang diberikan kepada personil keamanan dari para ahli yang berkualitas. Ada keluhan dari beberapa LSM bahwa pelatihan itu sering diberikan kepada polisi dan tentara oleh Komandan mereka. Bahkan jika Komandan telah dilatih dengan baik, ini bukan metode yang memadai dan tidak memenuhi persyaratan ICBS. Pelatihan berkala oleh para ahli HAM, seperti ICRC atau LP3BH, sangat penting jika ada kepastian bahwa semua personil telah dilatih dengan baik.

Selain itu, meskipun latihan Bersama tahunan tidak lagi menjadi kewajiban kontraktual polisi, latihan itu harus tetap berlanjut, karena ancaman berevolusi menjadi baru dan lebih realistis. Ini sangat penting karena Komandan dan pasukan di wilayah tersebut berotasi secara rutin, dan personil baru mungkin tidak familiar dengan prosedur ICBS dan ancaman yang sering terjadi. Selanjutnya, ketika perusahaan baru memulai operasi industri di Teluk Bintuni, mereka harus diundang untuk berpartisipasi dalam pelatihan gabungan, dan didorong oleh BP untuk

mengadopsi prosedur keamanan yang serupa dengan ICBS. Pada saat ini, langkah-langkah ini telah mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan Kapolda³⁶.

Keamanan cyber tetap merupakan komponen yang terpisah dan penting bagi keseluruhan keamanan Tangguh. BP secara global mengalami jutaan serangan cyber setiap harinya. BP telah mengambil pendekatan serius dan berlapis terhadap ancaman semacam itu di Tangguh, yang dirancang oleh tim keamanan kelompok global BP dan dintinjau oleh mereka secara teratur. Ada dinding yang memisahkan semua kegiatan operasional Tangguh dari internet, sehingga operasi ruang kendali tidak dapat diretas dari luar. Ada juga pelatihan pekerja yang luas tentang ancaman cyber. TIAP terus mendorong BP untuk menganggap ancaman cyber sama berbahayanya dengan ancaman fisik, dan melengkapi Tangguh dengan teknologi terkini dan terbaik dan pelatihan untuk melawan ancaman semacam itu.

Di bawah ini rekomendasi spesifik yang berkaitan dengan keamanan dan HAM:

- **Pada saat ini ICBS telah dimodifikasi dan polisi telah ditempatkan di Tangguh ("QRF"), BP harus bekerja sama dengan polisi untuk menjamin semua personil di QRF telah menerima pelatihan HAM dari ahli perlindungan HAM yang bersertifikat. BP juga harus meyakinkan Kapolda untuk hanya menempatkan masyarakat Papua di program QRF.**
- **BP harus menjamin bahwa semua pengawasan dan pelaporan oleh QRF yang sesuai dengan PROSEDUR OPERASIONAL diimplementasikan secara penuh dan semua isu yang timbul dari pelaporan tersebut ditangani dengan tepat dengan pihak kepolisian dan SKK Migas.**
- **Meskipun pelatihan gabungan tahunan tidak lagi menjadi komitmen dari pihak keamanan public, BP harus terus melakukan pelatihan tersebut bagi personil keamanannya dan secara aktif mengajak partisipasi dari Kepolisian dan TNI**
- **Semua petugas keamanan Tangguh harus terus menerima pelatihan HAM rutin dari ahli yang berkualitas, dan BP harus secara aktif mendorong Kepolisian dan TNI untuk menyediakan pelatihan serupa bagi personelnya yang akan bertanggung jawab terhadap kejadian di Tangguh**
- **Sebagaimana kegiatan transportasi dan perdagangan meningkat di area sekitar Tangguh, BP harus terus meningkatkan penggunaan**

³⁶ TIAP tidak bisa bertemu dengan Pangdam Papua Barat, yang merupakan orang Papua, atau Komandan TNI daerah (yang baru saja berpulang karena kecelakaan). Namun, TIAP telah bertemu dengan Pangdam sebelumnya, yang menyarankan tambahan kehadiran Polisi atau TNI di area Teluk Bintuni.

drones, kamera, dan teknologi lainnya untuk mengawasi dan mengamankan parameter Tangguh

- BP harus waspada terhadap partisipasinya dan dukungannya kepada FKPM, untuk memastikan bahwa forum-forum tersebut tidak mengarahkan perspektif bahwa BP membantu pihak kepolisian dalam mengumpulkan data atau membangun kehadiran polisi di kampung-kampung terdekat
- Sejauh ini, koordinasi dan pengawasan keamanan dari CSTS telah berjalan dengan baik, baik dalam mencegah pekerja TEP membawa senjata atau barang terlarang lainnya ke dalam site dan dalam mengelola beberapa insiden yang telah terjadi. Kesuksesan ini tidak harus mengarah pada kepuasan. Pelatihan, kewaspadaan, dan hal yang sudah BP lakukan hingga saat ini harus dilanjutkan dengan ketat sebagaimana CSTS terus menurunkan jumlah pekerja TEP
- BP harus bekerja bersama dengan Bupati, SKK Migas, dan pejabat regional untuk mendorong kewajiban AMDAL yang setara kepada pengembang industri lain di Teluk Bintuni, untuk mengadopsi dan memenuhi pengaturan keamanan, kebutuhan tenaga kerja dan program sosial sebagaimana yang diimplementasikan oleh BP
- BP harus terus berinvestasi dalam teknologi dan prosedur teknologi keamanan daring dan secara teratur meninjau praktik daring-nya. Semua karyawan yang memiliki akses ke sistem operasi Tangguh harus diberikan pelatihan keamanan dunia maya secara teratur.

A. Lingkungan, Tampilan, dan Pemeliharaan

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja lingkungan Tangguh sangat baik. Setelah menerima level biru dari audit PROPER yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup selama 4 tahun berturut-turut, Tangguh berhak untuk dan memperoleh level hijau yang memerlukan status level biru selama 5 tahun. Level emas merupakan penghargaan tertinggi. Pencapaian ini sangat baik mengingat masuknya jumlah pekerja TEP dalam jumlah besar selama dua tahun terakhir dan dampak dari konstruksi. Audit Panel Lenders (Peminjam) terhadap kepatuhan lingkungan pada juli 2019 tidak menemukan ketidakpatuhan (non-compliance). Jadi, tidak hanya operasi Tangguh bekerja tanpa ketidakpatuhan lingkungan, tapi CSTS, dengan bekerjasama dengan BP, juga telah beroperasi tanpa masalah selama ini. Selain itu, BP telah memperoleh sertifikat ISO 14001:2004 bagi sistem manajemen lingkungan operasi Tangguh.

Secara terpisah, BP telah memulai restorasi 3.600 hektar tanah sebagai wilayah rehabilitasi bagi tanah yang sudah dipakai untuk membangun Tangguh. program ini akan segera mencapai 7.000 hektar, yang telah dipilih oleh

Pemerintah Papua Barat. Program rehabilitasi dijadwalkan akan selesai pada 2035, yang merupakan kewajiban dari AMDAL.

Walaupun pembakaran gas diperlukan untuk keselamatan operasi, BP dengan sukses mengurangi pembakarannya dan menyatukan emisi CO₂ dari 2009 hingga 2015³⁷, namun emisi CO₂ tetap stabil sejak tahun 2016, ketika Tangguh mencapai pengurangan emisinya secara berkelanjutan, SER, dari 6.3K ton CO₂, yang diraih pada 2019³⁸. Secara lebih luas, BP telah mulai menguji teknologi baru untuk menangkap dan memasukan kembali karbon dari produksi gas. Apabila pengujian ini memberikan hasil yang menjanjikan, maka akan dipertimbangkan untuk digunakan di Tangguh. Setiap program pemasukan kembali dibutuhkan persetujuan dari SKK Migas, yang harus diterima oleh BP. BP harus melanjutkan untuk mengambil tindakan apapun yang dapat dilakukan untuk mengurangi pembakaran gas ke depannya, khususnya di hari yang panas ketika api membentuk awan hitam.

Kondisi fisik di LNG site dan bangunannya secara umum sangat memuaskan. Tidak seperti beberapa kunjungan sebelumnya, fasilitas utama yang digunakan pekerja dan dilihat oleh siapapun yang datang berkunjung dipelihara dengan baik dan teratur. Ada beberapa tanda kerusakan di pintu masuk ke site, yang telah dibuang atau diganti. Secara keseluruhan tampilan Tangguh adalah perwujudan dari komitmennya terhadap kualitas dan kesempurnaan yang paling nyata, dan harus diperlakukan sebagai prioritas oleh BP dan kontraktornya yang bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas. BP harus menugaskan seorang manajer senior untuk mengawasi kinerja pemeliharaan fasilitas kontraktornya, dan membutuhkan perbaikan atau pembersihan segera terhadap tanda-tanda kerusakan yang terlihat.

Di bawah ini merupakan rekomendasi spesifik yang berkaitan dengan lingkungan dan pemeliharaan:

- **Pengawasan BP yang waspada dan berkoordinasi dengan CSTS terhadap perlindungan lingkungan harus tetap berlanjut hingga TEP selesai. Hasil yang baik hingga saat ini tidak bisa menjamin akan ada hingga proyek selesai.**
- **BP harus terus melanjutkan untuk mengambil tindakan apapun yang perlu dilakukan untuk mengurangi pembakaran gas, khususnya pada hari yang panas ketika pembakaran membentuk awan hitam.**
- **Ketika telah selesai BP, harus melihat kembali hasil dari survei perikanan rutin di Bintuni dan mengambil langkah untuk mengatasi**

³⁷ Lihat laporan TIAP Desember 2015 hal. 7

³⁸ Faktanya, emisi CO₂ di 2019 merupakan kelebihan emisi di tahun 2017 dari 4.6 ton, dan di 2018, 4.9 ton, karena pembakaran yang tidak biasa selama perbaikan yang direncanakan – TAR atau perjalanan yang tidak direncanakan di operasi.

degradasi yang ditemukan dalam survei tersebut. BP juga harus terus melakukan survei perikanan dua tahunan hingga tahun 2035.

- **BP harus menugaskan manajer senior untuk mengawasi kinerja pemeliharaan fasilitas kontraktornya, dan membutuhkan perbaikan atau pembersihan segera terhadap tanda-tanda kerusakan yang terlihat.**

VI. Dana Bagi Hasil

Distribusi dan pengelolaan pendapatan pemerintah yang transparan yang dihasilkan oleh Tangguh telah menjadi perhatian sejak sebelum operasi dimulai³⁹. Sampai saat ini, baik provinsi maupun kabupaten tidak dapat diaudit secara efektif oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) Nasional, dan hanya setelah tahun 2014, setelah dukungan tata kelola yang cukup besar diberikan oleh BP, apakah kapasitas keuangan kabupaten dianggap 'dapat diterima' (bukan ditingkat terbaik dari 'tidak berkualitas') oleh BPK⁴⁰. Perkembangan terbaru dalam manajemen pendapatan sumber daya alam mungkin mulai memperbaiki masalah akuntabilitas ini.

Oleh karena itu, diberlakukannya peraturan daerah ("Perdasus DBH") yang lama tertunda yang menerapkan alokasi pendapatan sumber daya alam provinsi, seperti pendapatan dari Tangguh, mungkin merupakan pengembangan paling signifikan terkait dengan tata kelola Papua Barat dalam beberapa tahun. Bagi masyarakat Teluk Bintuni, alokasi dan distribusi pendapatan sumber daya alam ("DBH") yang transparan dari Tangguh untuk kebutuhan lokal adalah salah satu elemen terpenting dari Otonomi Khusus Papua. dibawa ini ketentuan Otonomi Khusus tentang pembagian pendapatan, pendapatan pemerintah pasca- pajak gas bumi dialokasikan 70% untuk provinsi dan 30% untuk pemerintah pusat, kebalikan dari semua provinsi lain (kecuali Aceh). Undang-undang menetapkan bahwa 70% ini dialokasikan dengan formula khusus, dengan 6% diberikan kepada provinsi, 12% untuk kabupaten penghasil, 12% kepada kabupaten lain dan 40% akan didistribusikan sesuai dengan peraturan provinsi khusus, Perdasus DBH. Perkembangan Perdasus DBH ini membutuhkan waktu lebih dari satu decade untuk dicapai⁴¹, hal ini membuat frustrasi para pemimpin lokal. Hingga saat ini, hanya sedikit akuntabilitas atau transparansi tentang bagaimana 40% dari pendapatan ini telah dialokasikan⁴². Selain itu, tanpa Perdasus DBH ini, tidak ada pendapatan dari Tangguh telah dialokasikan untuk masyarakat adat

³⁹ Lihat laporan TIAP Maret 2009, hal. 17-19

⁴⁰ Lihat laporan TIAP Desember 2015, hal. 44-45

⁴¹ Lihat laporan TIAP Desember 2015 hal. 22-23; Laporan TIAP Desember 2017 hal. 19

⁴² Lihat laporan TIAP Desember 2015 hal. 44-45

setempat, yang telah membuat tuntutan untuk kompensasi dari BP dan pemerintah Indonesia sejak sebelum konstruksi di mulai.

Perdatus DBH menggambarkan kesepakatan diantara semua pihak dalam pembagian di berbagai jurisdiksi dan kebutuhan, termasuk kesehatan dan Pendidikan dan kepada masyarakat adat. Sangat penting, pembagian kepada masyarakat adat dibagi antara kebutuhan saat ini dan dana abadi bagi generasi selanjutnya. BP mendukung provinsi dengan pengumuman peraturan ini dengan membiayai analisis teknis dan hukum.

Namun, sementara Perdatus DBH selesai, tindakan tambahan perlu dilakukan di tingkat lokal sebelum pembagian dengan menggunakan formula yang akan digunakan. Kabupaten harus menetapkan tiga peraturan daerah, atau Perda, yang terdiri dari 1) alokasi spesifik untuk setiap tujuh suku di Teluk Bintuni; 2) Batasan penggunaan; 3) dan persyaratan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini tidak mudah atau langsung diterapkan. BP menyediakan dukungan tata kelola untuk Bupati dalam upaya ini. Bupati tetap tidak yakin mengenai bagaimana dana abadi yang akan dialokasikan untuk generasi selanjutnya, sebagai dana paska Tangguh⁴³. Namun, untuk pertama kalinya, hal ini mungkin dilakukan bahwa pendapatan dari Tangguh akan dibagikan secara transparan diantara suku-suku daerah dalam waktu dekat.

Di bawah ini merupakan rekomendasi spesifik yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil:

- **Mengikuti arahan sesuai dengan Perdatus Papua Barat, BP harus menyediakan dukungan yang sesuai bagi Bupati dan legislatif Teluk Bintuni dalam upaya mereka menyusun draft and implementasi Perdatus yang akan dialokasikan dan mengatur distribusi dana bagi hasil Tangguh ke kabupaten.**

VII. Pengembangan Tenaga Kerja Papua

Seperti yang telah dinyatakan oleh TIAP beberapa kali, komitmen BP yang paling penting dan terukur di bawah AMDAL adalah dengan merekrut, melatih, dan mempromsikan tenaga kerja Papua sehingga di 2029, 20 tahun setelah operasi dimulai, tenaga kerja Papua akan terdiri dari 85%, termasuk manajer yang akan mengelola Tangguh. Hal ini membutuhkan 78% tenaga kerja terampil dan 33% penyelia Papua⁴⁴. Komitmen ini terus dinyatakan oleh para pemimpin Papua sebagai warisan abadi Tangguh untuk Papua.

⁴³ Lihat laporan TIAP Desember 2015 hal. 45; Laporan TIAP Desember 2017 hal. 19

⁴⁴ Tenaga kerja Papua termasuk orang yang berasal dari Papua sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-undang no. 21/ 2001 mengenai Otonomi Khusus, atau: a) seseorang yang berasal dari ras Melanesia dengan asal

AMDAL TEP mewajibkan persyaratan baru kepada BP dan kontraktornya berkaitan dengan mempekerjakan masyarakat asli dan penduduk Teluk Bintuni dan Fakfak selama masa konstruksi⁴⁵. Untuk mengimplementasikan komitmen ini, kontrak EPC mewajibkan CSTS untuk mempekerjakan tenaga kerja Papua, termasuk dari Teluk Bintuni/ Fakfak, sebanyak 45% untuk tenaga kerja tidak terampil, 30% tenaga kerja semi terampil, 2% tenaga kerja terampil, dan 1% manajer di site. CSTS telah memenuhi komitmen di kelompok tenaga kerja tidak terampil, semi terampil, dan terampil, namun telah gagal mempekerjakan atau mempromosikan tenaga kerja Papua sebagai manajer/ penyelia, dimana hanya 4 dari 1463 pekerja adalah orang Papua⁴⁶. Dengan hanya tersisa lebih dari satu tahun TEP, BP harus mendorong CSTS untuk memenuhi komitmen tenaga kerja Papua ini.

Sejak sebelum operasi dimulai, BP telah melaksanakan komitmen ini dengan serius; hal ini telah direncanakan atau dimulai dengan berbagai upaya untuk meningkatkan tenaga kerja Papua di Tangguh⁴⁷. Namun hingga saat ini, tidak ada program yang telah mencapai target yang diharapkan, dengan jumlah tenaga kerja Papua tetap di 54% dari tahun 2011 hingga 2017, dan level tenaga kerja Papua terampil yang terus tetap⁴⁸. BP mengakui bahwa diperlukan upaya baru dan lebih besar untuk merekrut, melatih, dan mempromosikan tenaga kerja Papua apabila komitmen ini ingin dipenuhi.

A. Program Pemagangan Papua

Yang paling mendasar, di tahun 2016 BP mendirikan program pelatihan pemagangan baru, yang dirancang khusus untuk melatih calon anak muda Papua, terutama dari wilayah Teluk Bintuni, untuk pekerjaan terampil dalam operasi. Bersama dengan mitranya PetroTekno, yang sedang melaksanakan program di fasilitas seperti kampus terpencil di Ciloto, di pegunungan dekat Jakarta, mereka telah dengan hati-hati merekrut tiga kelompok yang masing-masing terdiri dari 40 lulusan sekolah menengah Papua yang mampu, sekitar 50/50 laki-laki dan perempuan muda, berdasarkan bakat dan motivasi mereka. Masing-masing dari 40 peserta dalam setiap kelompok (*batch*) dipilih dari sekitar 1.000 pelamar, sehingga program ini sangat efektif. Program perendaman tiga tahun pertama berfokus pada keterampilan Bahasa Inggris dan matematika

suku di Papua; b) ibu/ bapaknya berasal dari Papua; c) non-Papua yang menikah dengan seorang yang berasal dari Papua; or d) orang yang bukan berasal dari Papua, tapi telah hidup di Papua setidaknya selama sepuluh (10) tahun.

⁴⁵ Dengan tujuan memenuhi target, AMDAL TEP mendefinisikan orang Papua yang merupakan masyarakat asli, sebagai “masyarakat adat yang tinggal di wilayah pesisir Teluk Bintuni, terdiri dari suku Sebyar, Irarutu, Simuri, dan Patuanan Arguni, Wertuwar, SekarPikpik, yang mendiami wilayah adat tertentu, dan juga masyarakat lain yang diakui oleh masyarakat asli sebagai bagian dari kelompok adat mereka, dan telah hidup di wilayah tersebut sejak sebelum kehadiran Tangguh di 2002.”

⁴⁶ Lihat lampiran D.

⁴⁷ Lihat laporan TIAP Maret 2007 hal. 15-16; Laporan TIAP October 2011 hal. 31-35; Laporan TIAP Mei 2014 hal. 38-41.

⁴⁸ Lihat laporan TIAP Desember 2017 hal. 25

dasar dan sains, dan kemudian mengajar setiap siswa program khusus baik dalam mekanik, listrik atau pemeliharaan yang akan memberikan keterampilan yang disesuaikan dengan pekerjaan operasional yang sangat teknis di Tangguh. keselamatan, Bersama dengan nilai-nilai BP lainnya, adalah bagian integral dari keseluruhan program. Secara kritis, setiap siswa harus mengembangkan keterampilan bahas Inggrisnya secara memadai untuk naik ke tingkat berikutnya. Para siswa diuji dalam Bahasa Inggris dan pembelajaran tekni mereka diatur secara rutin. Sebanyak 32 dari 40 peserta lulus di kelompok pertama, dan saat ini mereka bekerja sebagai teknisi di Tangguh. Kelompok kedua akan lulus tahun ini, dan kelompok ketiga telah memulai pelatihan mereka. Jumlahnya, kurang lebih 100-110 pemuda/i Papua dapat ditawarkan pekerjaan terampil di bagian operasi dan produksi, pekerjaan yang memiliki potensi untuk menyediakan karir yang sukses di Tangguh atau perusahaan industri teknis lain. Lulusan ini diharapkan mampu untuk bekerja di Tangguh setidaknya selama 7 tahun⁴⁹.

TIAP bertemu dengan lulusan kelompok pertama di Tangguh dan ditemani ketika berkeliling pusat pelatihan oleh para peserta pelatihan saat ini⁵⁰. Program dan peserta ini sangat luar biasa; berpotensi menyediakan *feeder pool* bagi teknisi di masa depan, tenaga kerja terampil di Tangguh dan tempat lainnya. Walaupun pemuda/i ini tidak akan secara langsung menjadi manajer di Tangguh, mereka akan menjadi staf operasi selama beberapa tahun. TIAP sangat mendukung program ini. Walaupun hanya tiga kelompok yang direncanakan, karena pekerjaan mungkin tidak tersedia bagi lebih dari tiga kelompok lulusan, BP harus mengevaluasi kembali kebutuhannya di masa depan setiap tahun untuk memutuskan apabila beberapa pekerjaan akan dibuka dan membuka peluang bagi kelompok Papua yang lebih kecil yang akan berpartisipasi dalam program pelatihan ini.

Selain hasil langsungnya, program magang ini juga telah menghasilkan pelatihan tambahan yang akan bermanfaat bagi anak muda Bintuni lainnya. Program ini berfungsi sebagai model untuk program pelatihan yang lebih pendek, kurang selektif dan kurang terampil yang dilembagakan oleh Bupati. Bupati mengunjungi kampus PetroTekno dan mengundang perusahaan untuk mendirikan pusat pelatihan di Bintuni yang dapat memberikan keterampilan kepada kurang lebih 960 lulusan sekolah menengah yang setiap tahun mendaftar tetapi tidak terpilih untuk mengikuti pelatihan keterampilan BP. Program tiga bulan ini dimulai pada Juli 2018, tidak memerlukan kemahiran berbahasa Inggris tingkat lanjut dan berfokus pada kemampuan tenaga kerja semi-terampil, termasuk *scaffolding*, *pipefitting*, dan *welding*. Sejauh ini lima angkata dengan sekitar 400 lulusan telah menyelesaikan program, masing-

⁴⁹ Lihat lampiran E

⁵⁰ TIAP bertemu dengan beberapa peserta kelompok pertama di kunjungan terakhir mereka, dan melihat potensi yang luar biasa dari peserta dan program ini. Pak Augustinus Rumansara kemudian berkunjung ke fasilitas pelatihan secara terpisah, sebelum pelaporan TIAP terakhir. Lihat laporan TIAP Desember 2017 hal. 25-26.

masing memperoleh sertifikasi nasional dan internasional dalam kemampuannya. Semua telah menerima tawaran pekerjaan, banyak (sekitar 250) bekerja dengan CSTS; sementara yang lain bekerja di proyek konstruksi di Jakarta atau Malaysia.

Selanjutnya, karena banyak anak muda Bintuni tidak memiliki bakat dalam pelatihan teknis ini atau ambisius untuk masuk dalam pasar⁵¹, Bupati, Bersama dengan PetroTekno, telah membuat program keterampilan Bertani di Bintuni, yang berguna untuk mengajarkan metode menanam tanaman, seperti semangka, selada air, dan cabe, serta meningkatkan prestise pertanian sebagai jalur karir. Sejauh ini, terdapat 80 anak muda lokal yang berpartisipasi dalam program ini.

Walaupun BP tidak secara langsung bertanggung jawab bagi pelatihan lokal ini, contoh yang diberikan BP dalam program magang, dan inisiatif yang dimiliki oleh Bupati, telah memberikan manfaat secara tidak langsung. Pembangunan keterampilan yang dibutuhkan oleh CSTS untuk TEP akan berguna untuk pengembang proyek industri besar lain di wilayah yang sedang berkembang dan industri seperti Bintuni.

Program-program ini penting dan harus dilanjutkan, namun mereka tetap tidak akan dapat memenuhi kebutuhan manajer dan penyelia. Jika BP ingin memenuhi komitmen tersebut untuk tenaga kerja terampil dan manajer Papua di tahun 2029, BP harus meningkatkan rekrutmen eksternal bagi orang Papua yang berkualitas, berpengalaman untuk mengisi posisi senior tersebut. Setidaknya, BP harus meningkatkan proses rekrutmen di universitas Papua dan pasar lainnya yang memiliki tenaga kerja Papua, untuk menarik mereka sebagai pendaftar dan memperluas jaringan mereka. Ke depannya, BP harus bekerja sama dengan konsultan tenaga kerja untuk mencari tenaga kerja Papua yang dipekerjakan oleh perusahaan lain di tingkat penyelia atau manajer, yang dapat memenuhi kebutuhan pada saat awal yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja Papua yang pada saat ini telah bekerja di Tangguh⁵².

B. Kemajuan Masyarakat Papua

Bahkan dengan tersedianya tambahan tenaga kerja teknis di tingkat baru yang berkualitas, BP harus mendukung dan mengembangkan tenaga kerja Papua yang kurang terampil untuk menjadi terampil, menempati posisi manajerial, dan penyelia. AMDAL mewajibkan 78% posisi tenaga kerja terampil dan 35% posisi manajer diisi oleh orang Papua di tahun 2029. Keadaan pada saat ini menunjukkan 36% posisi terampil diisi oleh tenaga kerja Papua, dan 39% manajer/ ketua tim adalah pekerja Papua.⁵³ Maka dari itu, kemajuan yang nyata

⁵¹ Sejauh ini, program dibatasi bagi laki-laki karena keterbatasan fasilitas dan ketertarikan dalam karir tersebut.

⁵² TIAP telah memberikan rekomendasi yang sama sebelumnya. Lihat laporan TIAP Desember 2017 hal. 27.

⁵³ Pengertian manajer/ penyelia termasuk ketua tim, penyelia, ketua grup, mandor, dan kepala keamanan. Mayoritas pemimpin Papua berasal dari Sorong. Lihat lampiran F.

telah dibuat tapi inisiatif ke depan tetap dibutuhkan. Demi mencapai tujuan ini, atas perintah pekerja Papua⁵⁴, BP telah meningkatkan kerjasamanya secara drastic dengan *Papuan Employee Steering Committee*, sebuah kelompok pekerja Papua, yang tidak ditentukan oleh BP, yang merupakan perwakilan dari kelompok yang lebih besar. Banyak diantaranya telah bekerja di Tangguh sebelum masa operasi di mulai. Komite ini menyediakan mekanisme komunikasi rutin dan terstruktur bagi pekerja Papua untuk menyampaikan kekhawatiran atau saran mereka terkait dengan pekerjaan dan kesempatan mereka. Di beberapa tahun belakang, manajemen senior BP telah bertemu dengan beberapa anggota komite yang ada pada saat kunjungan mereka ke site, dan mencatat saran mereka dengan baik. Anggota komite mengetahui komitmen dari senior manajemen untuk mengatasi tantangan dalam mengembangkan tenaga kerja Papua. Komitmen ini sangat penting untuk dilanjutkan dan diteruskan menjadi komitmen pada manajer di tingkat menengah.

Satu area spesifik di mana interaksi ini menciptakan beberapa hasil yang positif diantara para pekerja saat ini dengan bimbingan dari para manajer. Semua pekerja Papua saat ini telah memiliki pembimbing, yang dapat mereka ganti apabila mereka tidak puas. Sebagian besar percaya bahwa memiliki pembimbing yang berdedikasi untuk mendukung kepercayaan diri dan menghadapi tantangan dalam mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Selama pekerja berkebebasan untuk mengganti pembimbing mereka tanpa konsekuensi yang merugikan, manajemen senior masih harus mendorong semua manajer di Tangguh untuk membimbing semua pekerja Papua yang meminta bimbingan mereka. Namun seorang pembimbing tidak bisa menyelesaikan situasi sulit pekerja yang mereka hadapi dengan penyalahgunaan mereka, yang mungkin tidak ada insentif bagi mereka untuk mendorong karir pekerja Papua.

Dengan demikian, manajemen senior juga harus mendorong, sedapat mungkin, manajer non-Papua untuk mendukung dan mempromosikan pekerja Papua yang berkualitas di tim mereka.

Secara terpisah, program telah tersedia bagi insinyur Papua dan manajer lain untuk meningkatkan tingkat keterampilan mereka dan pengalaman internasional mereka. Program *Tangguh Emerging Leadership Development* dan program *Challenge* menyediakan kesempatan ini untuk mereka. Namun, tidak ada pekerja Papua yang direkrut untuk program *Challenger* selama beberapa tahun belakangan. Program-program ini memberikan peluang kepada pekerja Papua untuk naik ke posisi senior manajemen. Oleh karena itu, penting bagi BP untuk melanjutkan kedua program ini untuk mencapai target Tangguh dikelola oleh mayoritas pekerja Papua di tahun 2029. Oleh karena itu, BP tidak seharusnya membatasi pemilihan *Challenger*-nya bagi individu yang bisa

⁵⁴ Lihat laporan TIAP Desember 2015 hal. 38-39

dengan cepat mengisi peluang manajer tertentu di Tangguh. *Challenger* Papua terpilih dapat memulai di proyek BP lain atau operasi, kembali ke Tangguh jika, dan ketika, ada kesempatan. Lima tahun ke depan, BP harus memilih setidaknya dua *Challenger* Papua setiap tahun, termasuk setidaknya satu perempuan, untuk mengembangkan kumpulan pekerja yang sangat terampil.

C. Pengelolaan Tenaga Kerja Kontraktor

BP telah lama memiliki kesulitan untuk memenuhi target pekerja Papua ke kontraktornya, baik di operasi dan konstruksi⁵⁵. Untuk memperbaiki hal ini, saat ini BP memiliki otoritas untuk masuk ke kontrak lima tahunan. Hal ini seharusnya mampu memberikan waktu yang cukup untuk mengawasi dan mendorong semua persyaratan tenaga kerja. Selain itu, banyak pekerjaan yang berhubungan dengan operasi telah dikontrak sebelumnya, tapi saat ini telah diisi oleh pegawai BP, yang juga akan memenuhi target tenaga kerja Papua. BP telah memasukan sanksi finansial di dalam kontrak bagi kontraktor yang tidak memenuhi persyaratan perekrutan tenaga kerja Papua; jika CSTS atau subkontraktornya gagal memenuhi tujuan ini, BP harus mengenakan sanksi padanya.

Tentunya, selama konstruksi TEP, mayoritas rekrutmen pekerja Papua telah dilakukan oleh konsorsium CSTS sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak EPC⁵⁶. Hal ini memerlukan rekrutmen dan pelatihan bagi banyak pekerja konstruksi Papua, termasuk 100% tenaga kerja tidak terampil, 93% tenaga kerja semi terampil, 12% tenaga kerja terampil dan 6% manajer. Kontrak secara spesifik mewajibkan CSTS untuk mengembangkan rencana pengembangan pekerja masyarakat asli dan Papua, laporan implementasi bulanan diperlukan, untuk melihat gap dan menyusun rencana untuk menutup gap tersebut.

Terdapat lebih dari 14.000 pekerja di site pada saat TIAP berkunjung, dan diperkirakan bahwa akan ada 25.000 – 30.000 orang akan bekerja selama konstruksi TEP. CSTS telah memenuhi banyak kewajiban kontraknya, termasuk bagi tenaga kerja tidak terampil, semi terampil, dan terampil. CSTS juga telah melakukan program “Upskilling” yang mana telah memberikan 626 pekerja Papua keterampilan baru, termasuk 206 orang yang saat ini telah bekerja sebagai tenaga kerja terampil⁵⁷. Namun, meskipun upaya ini telah dilakukan, masih belum memenuhi target komitmennya untuk manajer/ penyelia, dimana pada saat ini terdapat 2% pekerja Papua, masih terdapat selisih sebesar 6%. Walaupun ada keterlambatan dalam jadwal proyeknya, tidak terlambat untuk mendorong kewajiban ini. Target tenaga kerja Papua telah terpenuhi ketika konstruksi kilang pertama dan kedua; mereka bisa dan harus memenuhinya

⁵⁵ Lihat laporan TIAP Desember 2015 hal. 34-36.

⁵⁶ Kontrak untuk Onshore LNG Engineering, Procurement and Contractor (EPC) untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG no. 4420001030, Bagian VIII.

⁵⁷ Lihat lampiran F.

sebelum TEP selesai. Hal ini akan sulit mengingat keterbatasan waktu, tapi BP harus bekerja dengan CSTS untuk mendorong upaya merekrut dan/ atau melatih pekerja Papua dan menjamin target untuk manajer Papua terpenuhi sebelum TEP selesai.

Di bawah ini merupakan rekomendasi spesifik yang berkaitan dengan Pengembangan Tenaga Kerja Papua:

- **Program pemagangan Papua merupakan keberhasilan. Saat ini direncanakan memiliki tiga angkatan yang berjumlah 40 orang akan mengisi 120 posisi teknisi tingkat pemula di Tangguh. Karena pentingnya program ini, BP harus secara tahunan mengevaluasi kebutuhannya untuk kebutuhan teknisi ke depannya dan, apabila akan ada peluang bagi teknisi tingkat pemula dalam tiga tahun, BP harus melanjutkan program tersebut dengan jumlah pelajar Papua yang sesuai yang bisa mengisi posisi tersebut.**
- **Apabila BP telah berhasil mencapai komitmennya pada tahun 2029, hal ini sama pentingnya dengan BP menyediakan peluang bagi tenaga kerja Papua untuk meningkatkan posisinya ke posisi manajer senior. Untuk menuju tujuan tersebut, manajemen senior harus bertemu dengan perwakilan dari pekerja Papua (*Papuan Steering Committee*) secara rutin ketika mengunjungi Tangguh; mereka harus mendorong para mentor untuk menyediakan bimbingan dan mendukung mentees Papua, dan, dimanapun, mendorong manajer non-Papua untuk mendukung dan mendorong tenaga kerja Papua yang berkualitas di tim mereka**
- **Tangguh telah mendirikan program *Tangguh Emerging Leadership Development* dan program *Challenger* yang menyediakan peluang bagi para pelajar Papua lulusan universitas yang berkualitas. Program-program ini membuat masyarakat Papua dapat naik ke jenjang manajemen senior. Untuk mencapai komitmen dimana Tangguh dijalankan oleh mayoritas tenaga kerja Papua di tahun 2029, BP harus memilih setidaknya dua *Challenger* Papua setiap tahunnya, termasuk perempuan diantaranya, untuk menjadikannya sebagai manajer yang terlatih.**
- **Untuk memenuhi komitmen tenaga kerja Papua terampil dan manajer di tahun 2029, BP harus meningkatkan penyerapan tenaga kerja Papua eksternal yang berkualitas, berpengalaman untuk memenuhi posisi senior. BP harus memperluas proses penerimaan tenaga kerja di Universitas Papua dan pasar tenaga kerja lain di Papua. Para pekerja Papua juga harus mengetahui apabila ada peluang kerja, agar mereka dapat mendaftarkan diri dan memperluas jaringan bagi pendaftar lain yang berpotensi**

- **CSTS sudah memenuhi persyaratan EPC kontrak untuk memperkerjakan tenaga kerja Papua tidak terampil, semi-terampil, dan terampil. Namun gagal dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk mempekerjakan tenaga kerja Papua di posisi manajerial/penyelia. Hal ini harus ditangani segera. BP harus bekerja dengan CSTS untuk mengimplementasikan penerimaan tenaga kerja tambahan dan menyediakan pelatihan yang sesuai, karena waktu yang semakin sedikit dalam memenuhi Tanggung jawab tersebut.**

VIII. Program Sosial dan Pengembangan Masyarakat

Selama hampir 15 tahun BP telah melakukan implementasi Program Sosial Terintegrasi (*Integrated Social Program – ISP*) yang setelah itu dilanjutkan oleh Program Pengembangan Berlanjutan Tangguh (*Tangguh Sustainable Development Program – TSDP*), banyak manfaat telah diberikan kepada tetangga Tangguh. Hal ini termasuk pelayanan kesehatan, Pendidikan, Community Action Plan (CAPs) untuk infrastruktur kampung, dan pengembangan ekonomi; semua program ini telah memberikan hasil yang signifikan dan menyeluruh. Namun program pengembangan masyarakat sejauh ini telah gagal untuk memberikan dua manfaat penting yang telah diharapkan oleh banyak orang di daerah: perumahan di pesisir utara dan elektrifikasi. Sementara BP juga tidak bertanggung jawab secara penuh untuk kesalahan dan penundaan yang telah menyebabkan kegagalan ini, pada akhirnya sesuai dengan AMDAL manfaat ini tetap harus diberikan.

A. Perumahan Pesisir Utara

Restorasi perumahan di pesisir utara dan infrastruktur di Kampung Terkana Dampak (“DAV) telah menjadi aspirasi masyarakat sejak tahun 2005, ketika pemukiman kembali dan pembangunan di kampung pesisir selatan dimulai. Sejak sebelum operasi dimulai, perbedaan besar keadaan rumah dan kampung antara pesisir utara dan selatan kampung-kampung DAV telah meningkat ketegangan diantara masyarakat suku utara dan selatan. Terdapat beberapa proposal untuk pembangunan rumah baru atau perbaikan bagi kampung-kampung ini sejak saat itu⁵⁸. TIAP telah lama mendesak BP untuk melanjutkan program semacamnya, meskipun itu bukan kewajiban secara hukum⁵⁹. Di tahun 2014, hal ini menjadi komitmen di dalam AMDAL TEP: untuk membangun 456 rumah baru (berdasarkan sensus tahun 2013) di distrik Weriagar, Taroi, dan Tomu. Perencanaan dan desain dilakukan, bersamaan dengan perjanjian kerjasama dengan pemerintah lokal, yang bertanggung jawab atas implementasi. Sebagai bagian dari terpilihnya Bupati baru

⁵⁸ Lihat laporan TIAP Mei 2014 hal. 28-30 dalam ringkasan.

⁵⁹ Lihat laporan TIAP Desember 2015 hal. 33-34.

dan Gubernur di tahun 2016, serta perselisihan mengenai desain dan kompensasi adat, program ini terus ditunda⁶⁰.

Sebagai hasil dari penundaan ini, hanya 21 rumah selesai dibangun pada saat kunjungan TIAP, dan masih ada kemungkinan kecil bahwa pembangunan dapat diselesaikan pada saat kilang ketiga dimulai.⁶¹ Beberapa perubahan telah dilakukan yang bertujuan untuk mempercepat pekerjaan ini. Paling penting adalah, BP, dengan mitranya, saat ini telah diberikan tanggung jawab pengelolaan; dan kontrak konstruksi multi tahun yang telah ditanda tangan. Tidak seperti sebelumnya, Gubernur dan Bupati keduanya saat ini secara aktif mendukung program dan melihatnya sebagai prioritas untuk mengatasi kecemburuan dan mengurangi ketegangan diantara kampung dan suku. Faktanya, Gubernur, Wakil Bupati, dan Kapolda berpartisipasi dalam upacara 'Potong Pita' sebagai perayaan selesainya pembangunan 21 rumah di Weriagar. Namun semua mengakui bahwa birokrasi, persyaratan perijinan, dan konflik lokal telah menyebabkan penundaan yang berkepanjangan. Pemimpin kampung mengetahui bahwa penundaan bukan merupakan salah BP; faktanya, mereka setuju bahwa BP harus mengambil alih program untuk mempercepat program.

Walaupun BP tidak dapat mengambil peran pemerintah lokal dan tidak dapat membangun rumah tanpa ijin dan otoritas yang dibutuhkan, ada asumsi bahwa dengan pengelolaan tanggung jawab proyek akan membuat pengambil alihan dan mempercepat pengembangan. BP, melalui mitranya, membangun tiga kampung di pesisir selatan sebelum membangun kilang 1 dan 2; walaupun kondisinya berbeda, namun pasti mampu mengelola pembangunan rumah-rumah ini sama dengan jangka waktu sebagaimana membangun jutaan milyar dolar pengembangan LNG.

Sementara terdapat banyak alasan atas beberapa penundaan, satu penyebab yang signifikan adalah sulitnya mendapatkan ijin penggunaan kayu Papua⁶². Karena adanya sejarah Panjang mengenai penebangan liar di Papua, terdapat beberapa perlindungan dan ijin yang dibutuhkan untuk mencegah penggunaan kayu ilegal. Kampung-kampung di pesisir selatan dibangun dengan menggunakan kayu dari bagian Indonesia lain; walaupun ini akan mahal, pendekatan yang sama harus diambil, setidaknya sebagai bagian, untuk mempercepat program sementara menunggu kayu Papua. BP dapat menempatkan senior manajer yang bertanggung jawab menyelesaikan program ini sebagai prioritas. Ke depannya, apabila rumah baru dibangun tidak sesuai dengan jadwal, yang mana sepertinya akan terjadi, kompensasi perlu diberikan untuk distrik yang terdampak. Kompensasi ini bentuknya, tapi satu mekanisme, sebagaimana telah TIAP rekomendasikan

⁶⁰ Lihat laporan TIAP Desember 2017 hal. 30.

⁶¹ Lihat Lampiran G.

⁶² Hal ini juga menjadi tantangan ketika bp berusaha menggunakan kayu dari pembukaan lahan untuk pembangunan kilang pertama dan kedua untuk perumahan pesisir utara, sementara kayu tersebut membusuk di tumpukan di LNG site.

sebelumnya⁶³, memperoleh persetujuan dari SKK Migas untuk membangun perbaikan infrastruktur yang dipilih oleh pemimpin masyarakat, sama dengan program CAPs, yang bermanfaat bagi seluruh kampung.

Di bawah ini merupakan rekomendasi spesifik yang berkaitan dengan Perumahan Pesisir Utara:

- **Komitmen AMDAL untuk membangun rumah-rumah baru di tiga distrik pesisir utara tidak akan selesai ketika TEP selesai. Program ini penting tidak hanya bagi pembangunan kampung, tapi juga untuk mengatasi ketegangan diantara masyarakat di pesisir utara dan selatan yang telah ada selama 15 tahun. BP harus mengambil peran pengawasan yang lebih besar dalam proyek, menempatkan senior manajer yang bertanggung jawab atas penyelesaiannya, dan mengamankan kayu dari mana pun yang tersedia untuk mempercepat penyelesaian pembangunan.**
- **Lebih lanjut, apabila pembangunan rumah tidak diselesaikan tepat waktu, kompensasi perlu diberikan kepada kampung-kampung yang terkena dampak. Bentuknya dapat berupa apapun yang telah disetujui. Satu mekanisme, yang memberikan manfaat kepada semua kampung, adalah dengan memberikan kontribusi pendanaan terhadap perbaikan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemimpin kampung, mekanisme ini sama dengan *Community Action Plans* ("CAPs").**

B. Elektrifikasi

Elektrifikasi bagi kota-kota terdekat dan kampung-kampung di Teluk Bintuni merupakan prioritas bagi masyarakat dan pemimpin mereka selama beberapa tahun. hal tersebut penting bagi layanan kesehatan yang lebih baik, Pendidikan, dan pengembangan ekonomi. Sejak pembangunan pemukiman di kampung pesisir selatan, yang mana telah dialiri 15 tahun yang lalu, hal ini telah menjadi sumber ketegangan.⁶⁴

BP, untuk bagian ini, telah memenuhi komitmennya dengan baik untuk menyediakan PLN kelebihan daya sebesar 8MW dari gardu yang dibangun di dalam LNG site pada tahun 2013. PLN mengikuti dengan menyambungkan kabel bawah laut ke Bintuni yang mengalir ke kota Bintuni dan diperluas ke gardu di beberapa kampung pesisir selatan. Namun sejak tahun 2015, PLN gagal untuk memperluas jaringan ke kampung pesisir utara, atau Babo dan sebagian kampung pesisir selatan. BP, dengan TIAP, telah bertemu dengan PLN di berbagai kesempatan untuk mendorong

⁶³ Lihat laporan TIAP Desember 2017 hal. 30-31.

⁶⁴ Lihat laporan TIAP Maret 2017 hal. 25. Elektrifikasi bagi kampung-kampung merupakan persyarata di *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP).

dan mendukung perluas daya berbasis jaringan ke wilayah lain di Teluk Bintuni. Namun, berbagai alasan, termasuk kesulitan membangun fasilitas fisik di pesisir selatan, dan harus menunggu penyelesaian pembangunan rumah di pesisir utara, PLN masih belum berbuat apa-apa⁶⁵. Masyarakat kampung dan pemimpin mereka secara umum mengerti bahwa kegagalan ini bukan merupakan kesalahan BP. Namun, sebagaimana perumahan di pesisir utara, hal ini merupakan kewajiban di dalam AMDAL dan akan tetap menjadi noda dalam kesuksesan seluruh program sosial dan pengembangan ekonomi hingga hal ini dapat diselesaikan. BP harus tetap melanjutkan untuk mendorong PLN untuk membuat investasi ini dan menawarkan dukungannya, tetapi tidak dapat memaksa PLN untuk melakukan sesuatu⁶⁶.

BP telah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi kegagalan ini. BP telah menyediakan beberapa pembangkit listrik tenaga diesel di Babo, yang telah menyala selama 12 jam untuk menerangi beberapa tempat, dan ke beberapa bagian kampung lain. Namun hal ini tidak cukup dan tidak ada nilai bagi kampung lain tanpa adanya pembangkit listrik pusat. Hingga PLN berkomitmen untuk memberikan kapan elektrifikasi akan dilakukan, BP harus meminta otoritas untuk menyediakan listrik tenaga diesel ke Babo dan, antara membangun pembangkit listrik diesel atau menyediakan lampu solar atau pembangkit listrik tenaga solar lainnya di semua kampung yang belum dialiri listrik yang merupakan cakupan dalam dokumen AMDAL TEP⁶⁷.

Di bawah ini merupakan rekomendasi spesifik yang berkaitan dengan elektrifikasi:

- **Listrik berbasis jaringan, yang merupakan komitmen AMDAL, belum diterima oleh masyarakat di kampung-kampung di pesisir utara dan selatan, termasuk Babo, yang mana terletak *base camp* dan bandara BP. BP telah memenuhi komitmennya untuk menyediakan pembangkit listrik, namun PLN belum membangun atau mengaktifkan jaringan listriknya. BP harus mendorong PLN untuk menyediakan infrastruktur ini. Namun hingga PLN berkomitmen untuk menetapkan waktu penyediaan jaringan listrik, BP harus meminta otoritas untuk menyediakan tenaga diesel di Babo selama 24/7, dan atau menyediakan tenaga diesel tambahan, atau menyediakan lampu solar atau pembangkit listrik tenaga solar lainnya bagi semua kampung yang belum dialiri listrik.**

⁶⁵ Faktanya, beberapa kampung di pesisir utara telah memiliki jaringan listrik yang didirikan oleh PLN yang belum diaktifkan.

⁶⁶ Sangat menggembirakan bahwa kepala SKK Miga sebelumnya, Pak Amin, saat ini ditunjuk sebagai Komisaris PLN, suatu perkembangan yang optimis. TIAP telah bertemu dengan komisaris yang baru, yang mengerti pentingnya elektrifikasi dan setuju untuk mengangkat hal ini ke manajemen PLN.

⁶⁷ Hal ini telah menjadi rekomendasi TIAP sebelumnya. Lihat laporan TIAP Desember 2017 hal. 31-32.

C. Pengembangan Ekonomi

Pengembangan ekonomi yang beragam, terlepas dari pendapatan dari bekerja di Tangguh, telah menjadi landasan dari program AMDAL BP sejak dulu. Program-program ini fokus pada usaha kecil, pengembangan usaha perempuan, mendukung koperasi agrikultur dan perikanan, dan peningkatan kapasitas bagi pengusaha lokal dan daerah⁶⁸. Sebagai hasil dari program spesifik ini dan dampak tidak langsung ekonomi dari Tangguh, pendapatan meningkat secara signifikan di Teluk Bintuni selama beberapa tahun terakhir. BP telah melakukan survei pendapatan dan sensus dua tahunan sejak tahun 2003. Survei terbaru, dilakukan di tahun 2018 oleh Universitas Indonesia ("UI"), ditemukan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga meningkat dari IDR 6.591.000 di tahun 2016 menjadi IDR 6.994.012 di tahun 2018, atau 6% di Teluk Bintuni dan Fakfak di distrik yang paling terdampak oleh Tangguh⁶⁹. Sementara peningkatan ini diterima oleh masyarakat non-Papua, yang mendapat pendapatan lebih tinggi dari masyarakat Papua, peningkatan pendapatan bagi masyarakat asli meningkat hingga 11,6% dan bagi masyarakat Papua lainnya sebesar 2,8%.⁷⁰

Hingga saat ini, perkembangan dan perluasan kapasitas koperasi buah dan sayuran dan ikan segar telah menjadi dampak yang paling terlihat. Koperasi ini sekarang telah memasok jumlah yang cukup besar terhadap permintaan bagi operasi Tangguh dan konstruksi TEP. Namun, pertumbuhan beberapa bisnis baru, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat asli, bisnis SUBITU, sebagaimana juga program taksi wai, menyediakan perkembangan ekonomi di Papua yang menjanjikan dalam jangka Panjang.

AMDAL TEP mewajibkan BP dan kontraktornya untuk menyerap 10% produk ikan, buah, sayuran, kacang-kacangan, pati, dan produk agrikultur lain dari masyarakat asli selama masa konstruksi dan 65% pada masa setelah konstruksi. Pembelian harus dilaporkan secara bulanan. Sebagian besar program ini telah berhasil, terhitung sebesar 17% dari semua pembelian TEP dan 100% pembelian bahan makanan segar dari operasi Tangguh. Sejak periode September 2017 hingga September 2019, TEP telah membeli 511 ton, senilai \$1.030.000. Jumlah pembelian bagi operasi Tangguh telah mencapai 2.875 ton, senilai lebih dari \$5 juta. Beberapa koperasi pada saat ini telah beroperasi secara mandiri, tanpa bantuan mentor BP.

⁶⁸ Lihat laporan TIAP Maret 2009 hal. 35-36; TIAP Januari 2011 hal. 21.

⁶⁹ Lihat Lampiran H. Namun, peningkatan ini hanya mengembalikan rata-rata pendapatan untuk mereka yang disurvei tahun 2013, ketika pada saat itu perhitungan ada di IDR 6.907.000. Lihat laporan TIAP Desember 2017 hal. 28-29. Data perbandingan historis ini dituliskan secara rinci di laporan TIAP Maret 2009 hal. 35-36, laporan TIAP Maret 2014 di Lampiran III dan laporan TIAP Oktober 2012 di Lampiran III.

⁷⁰ Data ini dikumpulkan dari 8 distrik (Kamundan, Tomu, Weriagar, Aranday, Babo, Sumuri, Bomberai, dan Kokas), di kedua kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak. Studi sebelumnya, dari tahun 2003 hingga 2016, dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), dan mungkin saja tidak sepenuhnya dapat dibandingkan karena penggunaan metodologi yang berbeda.

Namun, semua target bulanan masih belum terpenuhi. Masalah logistik yang menjadi kendala program masih tetap ada. Sebagai contoh, setiap bulan sebelum kunjungan TIAP, pembelian oleh CSTS dari koperasi Tanah Merah Baru menurun 30%, menyebabkan banyak produk segar tidak dapat dijual. Ini bukanlah insiden yang terisolasi. Kendala ombak, cuaca, dan ketersediaan kapal terkadang menunda penjemputan dan dapat menyebabkan spoliasi. Kekurangan ini merupakan tanggung jawab dari CSTS, tapi BP harus mengawasi kinerjanya saat ini, membantu menyelesaikan masalah, dan meminta rencana untuk menutup gap untuk mengatasi kekurangan tersebut. Apabila hal ini tidak dapat ditangani dengan baik, BP harus memberikan penalti sesuai dengan kontrak⁷¹. Hal ini berkaitan dengan permintaan jangka Panjang yang berkelanjutan dari produk segar setelah selesainya konstruksi TEP yang akan berkurang dengan datangnya berbagai proyek industrial lainnya yang akan datang ke daerah tersebut, yang akan menyebabkan pertumbuhan di daerah tersebut, yang seharusnya menyediakan pembeli bagi produk lokal.

Bisnis Subitu yang telah diinkubasi oleh program pengembangan wirausaha terus memperlihatkan keuntungan, yang meskipun tidak dalam waktu dekat, menjanjikan. Bisnis manufaktur pakaian dan perbaikan AC telah beroperasi selama lebih dari 4 tahun⁷². Dengan dukungan dari BP, masing-masing usaha ini berpotensi untuk menjadi badan usaha mandiri yang dikelola oleh masyarakat asli. Sebagai tambahan, kegiatan lain yang secara historis dimiliki dan beroperasikan oleh masyarakat non-Papua, seperti laundry, *scaffolding*, pemadam kebakaran, dan perbaikan mesin dan kapal, berpotensi dikelola secara mandiri oleh usaha masyarakat asli dengan dukungan BP.

Secara terpisah, BP telah memulai bisnis taksi air di Teluk Bintuni, dimulai dengan 3 kapal yang bisa mengangkut penumpang dari Bintuni ke Babo dan tempat lainnya. Tambahan layanan ini membuat perluasan kegiatan perdagangan dan interaksi sosial yang signifikan bagi berbagai orang di Kawasan tersebut. Pada saat ini, layanannya masih terbatas dan mahal bagi masyarakat lokal. Tapi sangat dibutuhkan bagi pengembangan dan integrasi ekonomi Teluk Bintuni yang harus didukung oleh BP hingga bisa dikelola secara mandiri. Tarif harus bisa disubsidi, jika diperlukan, dipasang sesuai dengan kemampuan masyarakat lokal. Upaya-upaya untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah lokal, regional, dan nasional diperlukan untuk menjamin bahwa layanan ini tetap berlanjut⁷³. BP harus berupaya untuk menggunakan taksi air sedapat mungkin untuk transportasi para pekerja.

Secara bersamaan, bisnis-bisnis ini, dan pendampingan oleh layanan pengembangan bisnis oleh BP, merupakan komponen yang penting bagi program

⁷¹ Lihat kontrak EPC, bagian VIII Local Content.

⁷² TIAP mengunjungi kedua bisnis tersebut, bertemu dengan pemilik dan pekerjaannya pada kunjungan sebelumnya. Lihat laporan TIAP Desember 2015 hal. 48; Laporan TIAP Desember 2017 hal. 29.

⁷³ BAPENNAS, Badan Perencanaan Nasional, di dalam presentasinya kepada TIAP, menyoroti transportasi lokal dan antar pulau sebagai salah satu kunci pembangunan Papua.

pengembangan ekonomi Tangguh dan mungkin merupakan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat Teluk Bintuni.

Dibawah ini merupakan rekomendasi spesifik yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi:

- **Koperasi produksi dan ikan di Teluk Bintuni yang dikelola oleh BP secara umum telah berhasil. BP telah memenuhi kewajiban pembeliannya. Namun CSTS belum memenuhi semua komitmen pembeliannya, sebagian disebabkan oleh keterbatasan logistic dan waktu. BP harus bekerja dengan CSTS dan subkontraktornya untuk menyelesaikan semua isu yang akan menjadi tantangan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Apabila jumlah penyerapan produk tidak tercapai, BP harus mendorong pinalti kontrak dan menyediakan kompensasi bagi koperasi kampung.**
- **Unit usaha SUBITU yang telah dibina oleh BP merupakan unit usaha yang menjanjikan, dan tetap membutuhkan dukungan BP, setidaknya hingga usaha tersebut mulai beroperasi di Teluk Bintuni dan menyediakan pasar alternatif. BP harus mendukung terbentuknya unit usaha lokal tambahan, seperti laundry, *scaffolding* dan pemeliharaan.**
- **Unit usaha taksi air yang didukung oleh BP merupakan elemen penting di dalam pembangunan ekonomi di Teluk Bintuni. BP harus bekerja sama dengan Bupati untuk memastikan keberlangsungan operasi, dan mencari perusahaan lain yang akan masuk ke daerah tersebut untuk mendukung atau mensubsidi usaha ini.**

D. Pelayanan Kesehatan

Kemajuan pelayanan kesehatan yang dramatis di Teluk Bintuni telah menjadi salah satu manfaat yang sukses yang diberikan program sosial Tangguh. Selain itu, program pengentasan malaria di daerah tersebut (0% di 2019), yang mana masih massif penyebarannya ketika pembangunan Tangguh dimulai⁷⁴, dan yang telah menerima penghargaan dari Pemerintah Indonesia, BP global dan, yang baru ini terjadi, PBB⁷⁵. Lebih umum, Pos Pelayanan Keluarga Berencana (Posyandu) telah didirikan di masing-masing kampung dan telah membantu untuk mencegah dan merawat penyakit lain, memperbaiki kesehatan ibu dan anak dan menanamkan perilaku kesehatan yang lebih baik. Klinik ini telah menjadi rujukan dari lebih dari 810 orang untuk melakukan tes TBC dan 6.100 orang untuk melakukan tes HIV/AIDS. Klinik yang lebih maju (Puskesmas), yang menyediakan layanan bagi wanita hamil

⁷⁴ Lihat laporan TIAP Maret 2009 hal. 33-34.

⁷⁵ Bupati memenangkan penghargaan Indonesia Innovation in Public Service Award di bulan Mei 2015; Juni 2018 Malaria Program di Teluk Bintuni memenangkan <https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/bp-magazine/malaria-project-wins-un-award.html>.

beresiko tinggi, yang telah beroperasi di Babo, dan saat ini beroperasi juga di Aranday dan Kokas. Rumah sakit di Bintuni, yang telah beroperasi dari tahun 2005, tetap merupakan satu-satunya pelayanan kesehatan terbaik di daerah tersebut, namun tetap membutuhkan dukungan BP untuk memperluas kapasitasnya dan menjadi rumah sakit rujukan, yang merupakan tujuan utama Bupati.

Di bawah ini merupakan rekomendasi spesifik yang berkaitan dengan layanan kesehatan:

- **Pelayanan kesehatan di daerah telah meningkat secara drastic sebagai hasil dari inisiatif BP dan dukungannya bagi program kesehatan di kabupaten. Namun pelayanan kesehatan masih secara signifikan berada di bawah standar nasional. Rumah sakit Bintuni merupakan kunci sukses kemajuan untuk hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. BP harus tetap melanjutkan untuk tetap bekerja sama dengan Bupati untuk memperbaiki fasilitas dan kapasitas rumah sakit untuk menjadi rumah sakit rujukan.**

E. Pendidikan

Dukungan BP untuk Pendidikan dasar di Teluk Bintuni telah menyediakan manfaat signifikan untuk masyarakat selama 15 tahun terakhir. Selama ini, BP telah bekerja dengan mitra berbasis religi untuk membawa guru-guru berkualitas ke kampung dan kota. Walaupun masih ada beberapa kekhawatiran terkait dengan retensi guru dan penyediaan, hasilnya positif. Kehadiran dan pencapaiannya telah meningkat, tetapi pelajar di daerah ini secara umum tetap berada di bawah rata-rata nasional, ketersediaan buku terbatas, dan hanya sedikit siswa dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi⁷⁶. Salah satu ukuran keberhasilan program adalah kualitas pelajar yang ikut dalam program magang, banyak diantara mereka adalah pelajar sekolah dasar di area tersebut ketika program baru dimulai (lihat hal. 32-33 di atas).

Namun, ada penundaan yang lama dalam membangun sekolah unggulan di daerah, yang telah disetujui oleh BP dan masyarakat, dan dirancang untuk mengajarkan dan memperluas pelajar terbaik dan mempersiapkan mereka menuju jenjang universitas. Ada beberapa alasan untuk penundaan ini, namun seharusnya tidak mencegah BP dalam memenuhi komitmen tersebut, yang telah didukung oleh pemerintah di setiap level⁷⁷. Tantangan terbaru adalah dipindahkannya tanggung jawab pemerintah atas sekolah menengah dari pemerintah kabupaten ke provinsi. Walaupun hal ini tidak dapat diramalkan, BP sekarang harus bekerja dengan pemerintah Papua Barat untuk memenuhi komitmen tersebut, yang tetap harus menjadi prioritas.

⁷⁶ Lihat laporan TIAP Januari 2011 hal. 23; laporan TIAP Maret 2009 hal. 65-66.

⁷⁷ Lihat laporan TIAP Desember 2017 hal. 33.

Sebagai bagian dari perubahan yurisdiksi ini, pemerintah kabupaten, dengan dukungan BP, telah mendirikan sekolah unggulan atau sekolah dasar model di Tanah Merah Baru, menggunakan fasilitas yang awalnya ditujukan untuk sekolah menengah unggulan. Fasilitas sekolah lebih rendah ini merupakan peningkatan besar dari sekolah lain di daerah tersebut; memiliki ruang kelas tambahan, persediaan dan, terutama, computer untuk digunakan oleh siswa (yang tiba segera sebelum kunjungan TIAP). Bangunan ini juga memiliki fasilitas asrama siswa yang tidak tinggal di kampung tersebut. BP harus melanjutkan dukungan efektifnya untuk Pendidikan dasar di daerah Teluk Bintuni melalui mitranya untuk menyediakan guru, materi, dan computer bagi siswa di semua kampung yang tercakup di dalam komitmen AMDAL. Hal ini merupakan pencapaian yang penting, dan harus direplikasi ke kampung lain di daerah, baik di pesisir utara dan selatan. Namun itu tidak setara dengan sekolah menengah unggulan, yang telah dijanjikan dan dibutuhkan untuk mendidik siswa/i terbaik di Teluk Bintuni. Hal ini tetap perlu menjadi prioritas jangka pendek.

Selain itu, BP melalui SKK Migas harus melanjutkan menawarkan beasiswa bagi pelajar berkualitas di daerah, yang telah dilakukan sejak AMDAL sebelumnya. Tahun lalu, telah tersedia sebanyak 79 beasiswa penuh bagi pelajar lokal dari sekolah menengah dan universitas. Setidaknya hingga sekolah unggulan didirikan, beasiswa untuk melanjutkan Pendidikan ke daerah lain akan menjadi satu-satunya peluang bagi pelajar yang berkualitas.

Di bawah ini merupakan rekomendasi spesifik bagi Pendidikan:

- **BP harus tetap melanjutkan dukungan efektifnya bagi Pendidikan dasar di Teluk Bintuni melalui mitranya untuk menyediakan bantuan guru, materi, dan komputer bagi pelajar di kampung-kampung yang dicakup di dalam AMDAL.**
- **Dalam AMDAL BP berkomitmen untuk menyediakan setidaknya satu sekolah unggulan di area tersebut, di mana pelajar terbaik dapat belajar dan menyiapkan diri untuk menerima Pendidikan yang lebih tinggi. Komitmen ini telah tertunda selama beberapa waktu, baru-baru ini terjadi karena cakupan yurisdiksi bagi sekolah menengah telah dipindahkan dari kabupaten ke provinsi. BP harus dapat memenuhi komitmennya tersebut, bekerjasama dengan pemerintah untuk mendirikan sekolah rujukan baik di pesisir utara dan selatan Teluk Bintuni.**
- **BP harus melanjutkan upayanya untuk menyediakan beasiswa melalui SKK Migas kepada pelajar Papua yang berprestasi untuk melanjutkan ke Pendidikan universitas.**

F. Gas untuk Listrik bagi Papua

Menyediakan LNG bagi provinsi merupakan komitmen BP yang paling luas untuk perkembangan ekonomi Papua dan Papua Barat dalam AMDAL TEP. BP diwajibkan untuk mengalokasikan hingga 20mmcf/ haru (0.16mtpa) untuk pembangkit listrik di kota-kota pesisir dari dua provinsi ini, termasuk Jayapura, Manokwari, Fakfak, dan Sorong. Hal ini ditargetkan akan beroperasi saat selesainya kilang ke-3, tapi saat ini terlambat beberapa tahun. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perusahaan yang dimiliki oleh daerah (BUMD) di setiap provinsi, untuk membeli dan mengangkut LNG ke fasilitas yang dimiliki oleh PLN. Setelah beberapa kali penundaan, BUMD Papua Barat telah terbentuk. Namun, infrastruktur yang baru juga dibutuhkan untuk mengangkut, mengirim LNG serta mengisi kembali untuk membangkitkan listrik. Tidak ada satu pun yang dibangun hingga hari ini.

BP telah memenuhi kewajibannya untuk program ini. TEP akan memasukan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung tanker mini untuk proses pengiriman LNG ke daerah. BP juga telah menyediakan dukungan teknis dan mendanai studi kelayakan untuk membantu provinsi. BP tidak bisa membangun tanker mini, yang merupakan tanggung jawab BUMD, atau dermaga penerima, yang harus dibangun oleh PLN. Sebagai hasilnya, program ini tidak akan diimplementasikan selama beberapa tahun. Meskipun begitu, BP harus tetap bersiap untuk memasok LNG yang diperlukan ke kapal tangki mini milik daerah segera setelah tersedia. Untuk sementara, BP harus menawarkan Gubernur apapun dukungan teknis yang dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaiannya.

Di bawah ini adalah rekomendasi spesifik yang berkaitan dengan *Gas to Power* untuk Papua:

- **Penyediaan daya Tangguh LNG bagi listrik Papua telah menjadi tujuan dan saat ini komitmen. BP membangun semua fasilitas fisik untuk mengakomodasi tanker mini di dermaga barunya. Namun penundaan birokrasi dan ketidakaktifan PLN telah menunda implementasinya melebihi penyelesaian TEP. BP tetap bisa memainkan peran konstruktifnya, dan harus bekerja sama dengan Gubernur, PLN, dan semua pihak yang bertanggung jawab untuk mempercepat aktifasi program, khususnya di Papua Barat.**

G. Hubungan dengan Masyarakat

Hubungan BP dengan pemimpin daerah dan masyarakat banyak berhubungan dengan penyampaian program sosial dan ekonomi yang efektif yang sudah disebutkan di atas. Tanpa memenuhi semua janji-jani dan komitmen, yang telah menciptakan ekspektasi, pastinya akan ada kesulitan dengan hubungan masyarakat. Namun hubungan dengan pemimpin masyarakat juga tergantung pada kepercayaan, dan keyakinan bahwa BP peduli mengenai kesejahteraan

masyarakat, dan akan mengutamakan manfaat bagi masyarakat sedapat mungkin. Kepercayaan ini akan tumbuh dari tahun ke tahun, dan seperti ini akan menuju hubungan menghormati dan saling mengerti. TIAP tidak dapat menentukan dari pertemuan yang terbatas bahwa semua orang di Teluk Bintuni akan mendukung program Tangguh atau BP tanpa syarat; tetapi dapat disimpulkan bahwa kebanyakan orang, dan pemimpin mereka, terlepas dari keluhan atau kritik, menghargai apa yang BP dan Tangguh telah lakukan bagi daerah dan mengerti bahwa kegagalan untuk memberikan manfaat penting bukan sepenuhnya kesalahan BP.

Sebagian besar kepercayaan ini, yang telah dibangun bertahun-tahun, harus diberikan kepada individu CRT yang telah bekerja sebagai penghubung masyarakat dan membantu masyarakat kampung mengerti kompleksitas implementasi program, dan daya tanggap kepemimpinan C&EA terhadap keluhan, komplain, dan aspirasi dari masyarakat kampung. Namun demikian, hubungan ini masih rentan, dan akan diuji sebagaimana BP mengimplementasikan re-organisasi personel yang akan mengeliminasi beberapa posisi tenaga kerja Papua di CRP dan di site. Penting bahwa BP menjelaskan perlunya pengurangan yang berlaku dan melakukan apa pun yang mungkin untuk membantu menemukan posisi baru bagi masyarakat Papua setempat yang pekerjaannya dihilangkan dan untuk mengurangi dampak buruk dari re-organisasi lebih lanjut.

Lampiran A

Peta Papua dan Papua Barat



Lampiran B

Pemangku Kepentingan yang Bertemu dengan TIAP Kunjungan 2020

Pejabat Pemerintah: Indonesia

- **Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas**
- **Triharyo Indrawan Susilo, Staf Khusus Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral**
- **Mayjen TNI Wawan Kustiawan, Deputy Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia**
- **Amien Sunaryadi, Presiden Komisaris PLN**
- **Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D, Staf Khusus Pengembangan Kesetaraan dan Daerah/ Ketua Desk Papua, BAPPENAS**
- **Dr. Velix Wanggai, Direktur Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan, BAPPENAS**

Pejabat Pemerintah: Amerika Serikat

- **David Greenberg, Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar Amerika Serikat**

Pejabat Pemerintah: Inggris

- **Owen Jenkins, Duta Besar Inggris untuk Indonesia**

Pejabat Pemerintah: Papua dan Papua Barat

- **Dominggus Mandacan, Gubernur Papua Barat**
- **BrigJend Dr. Tomagogo Sihombing, Kepala Kepolisian Papua Barat**
- **Petrus Kasihw, Bupati Teluk Bintuni**

Mitra Pelaksana:

- **Sarwono Pratomo Satrio, Presiden Direktur Petrotekno**
- **Hendra Pribadi, Direktur Petrotekno**

Organisasi non-Pemerintah (LSM):

- **Robert Mandosir, RMD Institute, Jayapura**
- **Yan Christian Warinusi, Direktur LP3BH, Manokwari**
- **Simon Banundi, LP3BH, Manokwari**
- **Fery Manufandu, LP3BH, Manokwari**
- **Pendeta Matheos Adadikam, Elsham, Jayapura**
- **Simon Petrus Inaury, YPMD, Jayapura**

Analisis Sektor Privat

- **Sidney Jones, Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict**
- **Douglas Ramage, Bower Group Asia**
- **Ahmad Syarif, Bower Group Asia**

Media

- **John McBeth, Jurnalis Independen**
- **Taufiqurrahman, Deputi Kepala Editor, The Jakarta Post**

Lampiran C

HSE Statistic: Tangguh Expansion Project

LAGING INDICATORS	YTD 2018	YTD 2019
Work Hour Total	12,507,198	33,015,636
BP PMT Work Hours	390,823	498,079
Contractors Work Hours	12,116,375	32,517,557
Fatality	0	0
DAFWC (frequency)	0(0.00)	0(0.00)
Recordable Injury (frequency)	10 (0.16)	16 (0.10)
First Aid	22	75
Loss of Primary Containment/ Spill	15	31

Source: Tangguh Expansion Project, 2018 and 2019

Lampiran D

TEP Workforce As of 22 November 2019

Skilled Level	IP no less than			BF no less than			Papuan			Non Papua			Overall H/C
	Actual		AMDAL	Actual		AMDAL	Actual		AMDAL	Actual		AMDAL	
	H/C	%	%	H/C	%	%	H/C	%	%	H/C	%	%	
Unskilled	408	58%	20%	300	41%	25%	21	3%	55%	0	0%	0%	729
Semi Skilled	295	28%	10%	441	41%	20%	245	23%	63%	88	8%	7%	1069
Skilled	140	1.2%	0%	518	4%	2%	705	6%	10%	10778	89%	88%	12141
Managerial/Supervisor	2	0.1%	0%	2	0.1%	1%	25	2%	5%	1434	96%	94%	1463
Total	845			1261			996			12300			15402

Lampiran E

Papuan technician apprentice programme

	Production	Mechanical	Instrument	Electrical	Total
Batch 1 (2016 intake)*	23			9	32
Batch 2 (2017 intake)	9	11	9	8	37
Batch 3 (2018 intake)		19	12	8	39
Total	32	30	21	25	108

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Batch 1 *						
Batch 2						
Batch 3						

- The program started with 120 apprentices (40 apprentices for each batch), however few of them couldn't continue the program
- Batch 1 completed the program in January 2019. They have worked as Production or Maintenance Technician at Tangguh LNG (32 technicians).

	Female	Male	Total
Teluk Bintuni Regency	24	21	45
Fakfak Regency	24	16	40
Manokwari Regency	5	12	17
Sorong Regency	2	2	4
Jayapura	1	1	2
Total	56	52	108

- Three year training programme at Ciloto (6 days a week)
- Meet international, national and BP standard
- LNG technical skills, BP values & behavior, safety, English and soft skills (class room and workshop)

Lampiran F

Papuan Workforce Development

Skilled level	Indigenous People	Papuan	Non-Papuan	Total employee	% Papuan by level
Unskilled	9	6	1	16	94.0%
Low skilled	88	96	0	184	100.0%
Semi skilled	125	244	54	423	87%
Skilled	32	220	433	685	37%
Managerial/Supervisor	13	49	98	160	39%
Total	267	615	586	1,468	60%

Table 1 Workforce at Tangguh Operation (October 2019)

IP and Papuan Upskilling

As of 22 November 2019

Skills level upgrade

Skilled Level (When hired)	Current Skilled Level	IP	Bintuni & Fakfak (B/F)	Other Papuan (OP)	Total
Unskilled	Semi-Skilled	275	107	38	420
Unskilled	Skilled	34	11	4	49
Semi-Skilled	Skilled	19	34	104	157
Total		328	152	146	626

Lampiran G

North Shore Housing Program

District	Total Beneficiaries *	Progress as of 31 Dec 2019	Remaining 2020-2024
Weriagar	171	5 completed of 137 target	166
Tomu	205	13 completed of 37 target	192
Taroy	80	3 completed of 20 target	77
TOTAL	456	21 completed	435

**In accordance to cooperative agreement*



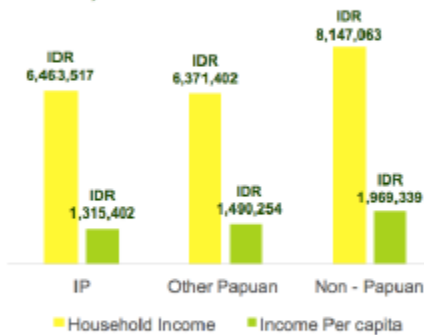
Lampiran H

Survey of Local Household Incomes 2018

Scope

- This survey conducted in 2018 by UI. The data gathered from 8 districts (Kamundan, Tomu, Weriagar, Aranday, Babo, Sumuni, Bomberai and Kokas), both in Teluk Bintuni and Fakfak regencies. The result compare to income survey in 2016 by UGM.
- Involved 1,025 respondent samples who were separated in three segments such as indigenous people (IP), other Papuan, and non - Papuan community
- In general the average household income increased from **IDR 6,591,000** in 2016 to become **IDR 6,994,012** in 2018.
- While income per-capita in 2018 is IDR 1,381,132, the amount are slightly higher compare to Bintuni (IDR 1,308,405) or Fakfak (IDR 865,702) or Papua Barat Province (IDR 1,121,892). (note: the UGM didn't measure income per-capita in 2016)

Income Survey Result (IDR per-month)



Survey of Local Household Incomes – trends 2016 to 2018

